


LAPORAN PENELITIAN

KERAGAAN INDUSTRI SKALA KECIL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN
WILAYAH (STUDI PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTAMADYA DI
SUMATERA BARAT

	MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
	21-9-96
	HD
	KKI
	547/HD/96 - k:1/2
No INVENTARIS	338.9 ALI k:1
KLASIFIKASI	

Oleh :

Drs. Alianis, MS

(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini dibiayai oleh :

Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang

Tahun Anggaran 1994/1995

Surat Perjanjian Kerja Nomor : 142/PT37.H8/N.1.4.2/1994

Tanggal 15 Juni 1994

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1995

LAPORAN PENELITIAN

KERAGAAN INDUSTRI SKALA KECIL. DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN
WILAYAH (STUDI PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTAMADYA DI
SUMATERA BARAT

Personalia Peneliti:

Ketua: Drs. Alianis,MS

Anggota: 1. Drs. Samsul Amar,MS

2. Drs. Akhirmen

ABSTRAK

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik dan dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Dalam proses pembangunan tersebut harus dikembangkan sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah. Untuk itu sangat perlu diketahui sektor ekonomi yang berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan wilayah.

Studi ini mencoba untuk melihat keragaan industri skala kecil dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat dalam runtun waktu lima tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut dipakai Economic Base Model. Dalam penerapan model ini diperlukan data skunder berupa nilai tambah sub sektor industri skala kecil pada tingkat kabupaten/kodya, propinsi dan nasional dan data pendapatan wilayah tingkat kabupaten/kodya, propinsi dan nasional.

Berdasarkan metodologi yang dipakai dalam studi ini, ditemukan: (1) Keragaan industri skala kecil selama periode analisa selalu menunjukkan perkembangan baik dalam hal unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi. (2) Keragaan industri skala kecil pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat menunjukkan keragaan yang relatif berbeda. (3) Industri skala kecil tergolong sebagai sektor basis dan menimbulkan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja wilayah Sumatera Barat. (4) Tidak seluruh daerah tingkat II di Sumatera Barat industri skala kecilnya tergolong sebagai sektor basis dan bagi daerah tingkat II yang industri skala kecilnya sektor basis, tapi tidak merupakan satu-satunya. Artinya, sektor basis pada daerah tersebut lebih dari satu sektor ekonomi

Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa industri skala kecil merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup potensial dikembangkan di Sumatera Barat, mengingat keberadaan dan perannya yang relatif berarti bagi percepatan pembangunan wilayah. Implikasinya adalah sangat perlu diupayakan kebijaksanaan yang terarah dan terpadu bagi pengembangan sub sektor ini. Kebijakan konkrit untuk itu adalah. Pertama, Program pembinaan yang terarah dan terpadu terhadap sentra-sentra industri skala kecil dan mengarahkan mereka untuk membentuk suatu wadah kerjasama dalam bentuk koperasi kerajinan rakyat

(Kopinkra). Kedua. Penyediaan fasilitas yang dapat membantu pengembangan industri skala kecil secara langsung seperti fasilitas kredit dan subsidi. Ketiga. kebijakan promosi, maksudnya mempromosikan produk-produk unggulan dari sub sektor ini sehingga dapat memperluas segmen pasar dari produk tersebut. Keempat. melindungi sub sektor ini dari tekanan industri skala besar. Artinya, harus diformulasikan kebijaksanaan yang jelas tentang pelarangan industri skala besar untuk memproduksi produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh industri skala kecil. Kebijakan lain yang perlu diupayakan adalah menjadikan industri skala kecil sebagai sub kontrak dan anak angkat bagi industri skala besar, terutama sekali terhadap produk unggulan yang pemasarannya berorientasi ekspor. Semua upaya kebijaksanaan tersebut sangat perlu direalisasikan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian Sumatera Barat pada masa mendatang, sehingga industri skala kecil dapat menjadi pelaku dan pemain utama dalam perekonomian Sumatera Barat.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh IKIP Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Lembaga Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana IKIP Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Saya menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun saya yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah mengikuti prosedur dan proses pemeriksaan yang berlaku di Lembaga Penelitian IKIP Padang, yaitu melalui telaah tim pereviu usul dan laporan penelitian, yang dilakukan secara "blind reviewing", dan seminar penelitian yang

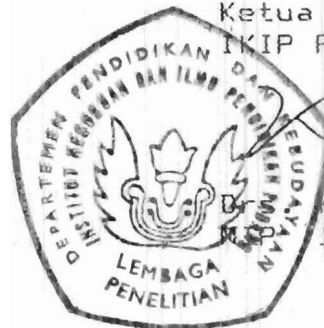
melibatkan dosen senior dan tim Kredit Point IKIP Padang. Mudah-mudahan penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian, Dosen Senior dan anggota tim Kredit Point IKIP Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kerja sama yang baik ini diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Februari 1995

Ketua Lembaga Penelitian
IKIP Padang

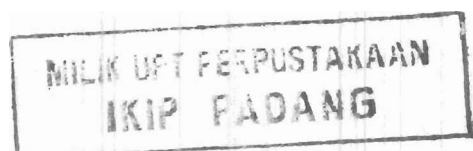


Kumaidi
Kumaidi, M.A., Ph.D.
130 605 231

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Pematasaan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
A. Dasar Pemikiran Pengembangan Industri Skala Kecil.....	12
C. Pemabangunan Wilayah	15
D. Konsep Basis Ekonomi.....	20
E. Analisis Dampak Pendapatan dan Kesempatan Kerja.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Batasan dan Ukuran Operasional.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Keragaan Industri Skala Kecil di Sumatera Barat.....	39
B. Analisis Dampak Wilayah	54
C. Keberadaan Industri Skala Kecil Pada Setiap Daerah Tingkat II di Sumatera Barat.....	68

BAR V	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN ...	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Implikasi Kebijakan	77
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Industri Kecil di Sumatera Barat per Daerah Tingkat II	7
Tabel 2. Keragaan Perkembangan Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988 - 1993	41
Tabel 3. Keragaan Industri Skala Kecil Dalam Hal Tenaga Kerja Per Unit Usaha, Investasi Per unit Usaha, Produksi Per Unit Usaha Investasi dan Produksi Per Tenaga Kerja. 1988 - 1993.....	44
Tabel 4. Keragaan Perkembangan Sub Sektor Industri Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988 - 1993	47
Tabel 5. Keragaan Industri Skala Kecil Dalam Hal TK/UU, I/UU, NP/UU, I/TK dan NP/TK 1980 - 1992	51
Tabel 6. Nilai Indeks LQ Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988 - 1992.....	55
Tabel 7. Indeks Surplus Relatif dan Absolut Industri Skala Kecil di Sumatera Barat 1988 - 1992	56
Tabel 8. Multiplier Pendapatan Jangka Pendek Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988 - 1992.....	58
Tabel 9. Multiplier Pendapatan Jangka Panjang Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988 - 1992	60
Tabel 10. Multiplier Tenaga Kerja Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988 - 1992.....	62
Tabel 11. Pertumbuhan Pendapatan Jangka Pendek Wilayah Sumatera Barat, 1988 - 1992	64
Tabel 12. Pertumbuhan Pendapatan Jangka Panjang Sumatera Barat, 1988 - 1992	65
Tabel 13. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Wilayah di Sumatera Barat, 1988 - 1992.....	67

Tabel 14.Indeks LQ Industri Skala Kecil Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat, 1988 - 1992.....	69
Tabel 15.Rata-Rata Nilai Indeks LQ Cabang Sub Sektor Industri Skala Kecil Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat, 1988 - 1992..	71
Tabel 16.Rekapitulasi Cabang Industri Skala Kecil Yang Tergolong Sektor Basis Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat, 1988 - 1992..	72
Tabel 17.Rata-Rata Nilai Indeks LQ Industri Skala Kecil, Industri Skala Menengah dan Besar Pertanian dan Jasa, 1988 - 1992	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam bentuk Repelita bertujuan untuk: 1) Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang makin adil dan merata, 2) Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Dari segi ekonomi hal ini berarti bahwa pembangunan hendaknya berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang lebih produktif.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan tersebut berpijak pada trilogi pembangunan yang terdiri dari unsur pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Dari ketiga unsur trilogi tersebut, unsur pemerataan lebih ditonjolkan terutama pada Pelita V sekarang. Kendatipun demikian dalam implementasinya kebijaksanaan pembangunan Indonesia masih dapat dikatakan berorientasi pada pertumbuhan. Hal ini terbukti dari target laju pertumbuhan ekonomi selama Pelita VI rata-rata 6.2 % per tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam bidang industri diprioritaskan untuk membangun berbagai jenis industri pengolahan yang cenderung berlokasi di perkotaan.

Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi yang secara moral tidak diinginkan sama sekali, seperti terjadinya kepincangan pendapatan baik antar golongan maupun antar daerah. Soemitro Djohadikusumo (1976) dalam penelitiannya menemukan bahwa 53 % dari Pendapatan Nasional Indonesia dinikmati oleh 20 % penduduk yang tinggal di kota dan taraf penghidupan yang lebih baik. Di lain pihak 40 % dari penduduk golongan menengah menikmati 32 % dari Pendapatan Nasional dan yang lebih memprihatinkan adalah 40% dari penduduk yang berpenghasilan rendah hanya menikmati 15% dari Pendapatan Nasional. Secara implisit penelitian ini menunjukkan bahwa sebahagian besar penduduk Indonesia tidak dapat memberikan partisipasinya dalam proses pembangunan.

Unsur distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat esensial dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian khusus pada usaha-usaha yang dapat meningkatkan penghasilan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian kepincangan antara golongan kaya dan miskin dapat dikurangi (Sayogyo, 1978).

Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun pembangunan merupakan suatu proses yang multi dimensi yang meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masvarakat (Todaro, 1983). Oleh karena itu yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi disamping peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok, juga menghapuskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masvarakat.

Soemarwoto (1981) mensinyalir bahwa beberapa proyek pembangunan hanya memberikan manfaat kepada golongan masvarakat kuat yang berada di luar proyek pembangunan. Dipihak lain golongan masvarakat lemah yang berada di sekitar proyek tetap hidup miskin, karena mereka tidak dapat mengambil manfaat yang ditimbulkan oleh proyek. Masalah ini perlu mendapat perhatian agar usaha pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Macalah lain yang ditemukan adalah tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja. Pada satu pihak hal ini akan dapat meningkatkan jumlah sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Namun karena keterbatasan dana dalam penambahan jumlah kesempatan kerja, maka hal ini diperkirakan akan dapat menimbulkan pengangguran (Kamaluddin, 1983).

Untuk menampung laju pertumbuhan angkatan kerja yang cenderung semakin meningkat, maka perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi baru di luar pertanian yang diharapkan dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Salah satu sektor yang diharapkan kehadirannya adalah sektor

industri, terutama sekali industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cocok dikembangkan di daerah pedesaan dan daerah pinggiran kota. Dengan berkembangnya industri berskala kecil di pedesaan, diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga terwujud unsur pemerataan dalam proses pembangunan.

Banyak studi empiris telah membuktikan bahwa industri yang berskala kecil berperanan penting dalam upaya menanggulangi masalah sosial ekonomi di negara berkembang. Industri kecil bukan saja dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan, tapi juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi petani-petani miskin dan pekerja-pekerja sektor pertanian yang kehilangan sumber penghasilan utama mereka (Tambunan, 1989). Hal ini sejalan dengan kesimpulan Hoselitz bahwa industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang pada umumnya berlokasi dipedesaan dapat bertahan lama karena dapat membantu kehidupan petani, bahkan dianggap di beberapa daerah dapat menyumbang bahagian yang cukup lumayan terhadap pendapatan petani miskin (Raharjo, 1989).

Di Indonesia, berdasarkan laporan LPEM Fakultas Ekonomi UI dikemukakan bahwa diantara 8.6 juta tenaga kerja di sektor industri, maka sebanyak 1.6 juta diserap oleh industri kecil. Sedangkan berdasarkan sensus industri 1964 juga ditemukan bahwa 70 % pekerja industri bekerja di sektor industri kecil yang pada umumnya bersifat tradisional. Hal ini diduga karena

sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga tidak menuntut kualifikasi tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, sehingga kehadiran industri kecil di pedesaan dapat diambil manfaatnya oleh tenaga kerja yang ada.

Menyadari akan pentingnya kedudukan industri kecil dan kerajinan rumah tangga, maka pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk membina dan mengembangkannya. Dalam Pelita VI sekarang ini ada beberapa jenis industri yang dipacu perkembangannya antara lain:

1. Industri untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (dicakup dalam aneka industri).
2. Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri serta penyediaan bahan baku dan bahan penolong.
3. Industri yang memanfaatkan sumber alam dan energi (dicakup dalam industri kimia dasar).
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat dalam upaya mewujudkan pemerataan berusaha.

Khusus bagi industri skala kecil pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan dengan memantapkan program BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil) dalam bentuk: 1) Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK), Pusat pelayanan teknis dan pusat promosi. 2) Pembinaan di sentra-sentra produksi oleh tenaga pembina lapangan dan diikuti dengan program penunjang seperti penelitian, bimbingan dan penyuluhan serta kerja sama dengan instansi

terkait seperti Bank dalam rangka penyediaan kredit murah.

Industri skala kecil telah lama berkembang di Sumatera Barat yang tersebar pada setiap daerah tingkat II. Pada mulanya setiap sentra produksi hanya menghasilkan barang untuk kebutuhan lokal, namun akhirnya terjadi perluasan fungsi, disamping untuk kebutuhan lokal juga ditujukan untuk kebutuhan nasional bahkan internasional.

Berdasarkan laporan Kanwil Perindustrian Propinsi Sumatera Barat mengenai industri skala kecil, dikemukakan bahwa dalam periode 1989 sampai 1992 terjadi pertumbuhan rata-rata 2.41 % dalam bidang penyerapan tenaga kerja. Kelompok industri kecil menyerap 89.85 % tenaga kerja dari total tenaga kerja di sektor industri. Nilai investasi bertumbuh rata-rata 16 % per tahun dan industri kecil mengalami kenaikan 23 %. Produksi bertumbuh rata-rata 16.36 % per tahun. Disamping itu juga ditemukan data bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat rata-rata 10.96 % per tahun selama periode 1989 sampai 1992.

Pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat telah berkembang industri skala kecil sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut tentang keadaan industri skala kecil untuk setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat pada tahun 1992.

Tabel 1 secara eksplisit menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan industri skala kecil dan kerajinan rumah tangga dalam struktur perekonomian Sumatera Barat.

Tabel 1: Keadaan Industri Kecil di Sumatera Barat per Daerah Tingkat II

Daerah Tk. II	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Investasi (Rp.000)	Produksi (Rp.000)
1. Agam	4.744	14.321	2.652.591	16.324.957
2. Pacaman	2.749	7.244	7.391.877	7.661.626
3. 50 Kota	10.499	17.411	14.292.466	58.182.688
4. Solok	1.876	9.028	1.724.212	7.644.338
5. Padang Pariaman	2.646	10.988	27.735.776	50.056.585
6. Pesisir Selatan	3.940	9.115	3.797.069	4.222.442
7. Tanah Datar	7.293	12.589	673.218	10.403.412
8. Sawahlunto Sijunjung	673	5.996	31.524.574	26.026.618

Sumber: Departemen Perindustrian Propinsi Sumatera Barat, 1992.

Hal ini terbukti dari nilai produksi yang dihasilkan oleh sub sektor ini dalam jumlah yang relatif besar. Dilhat dari segi nilai tambah yang dihasilkan, dalam periode 1989 sampai 1992 sub sektor industri skala kecil menghasilkan nilai tambah rata-rata sebesar 11.97 % per tahun. Dalam periode yang sama sub sektor ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan pendapatan wilayah Sumatera Barat sebesar 10,74%.

Berdasarkan laporan tahunan kantor wilayah departemen preindustrian Prpopinsi Sumatera Barat, diperoleh data bahwa perkembangan industri skala kecil di Sumatera Barat dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak ekonomi terhadap pembangunan

wilayah Sumatera Barat, baik terhadap peningkatan pendapatan maupun peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu studi tentang Keragaan industri skala kecil di Sumatera Barat sangat perlu dilakukan sehingga pola pengembangan sub sektor ini dapat dilakukan secara terarah dan terpadu.

B. Masalah dan Pembatasan Masalah

Setiap usaha untuk meningkatkan laju pembangunan pada suatu wilayah, memerlukan pembicaraan mengenai sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan, yang secara potensial akan dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah.

Sumberdaya yang dimiliki setiap wilayah cenderung berbeda. Oleh karena itu setiap kebijaksanaan pembangunan tidak perlu sama untuk setiap wilayah, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, sehingga sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Perbedaan sumberdaya yang dimiliki juga mengakibatkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan pada suatu wilayah juga berbeda sesuai dengan kondisi alamiah wilayah tersebut. Berarti pertumbuhan suatu sektor ekonomi pada suatu wilayah erat kaitannya dengan ketersediaan faktor input yang digunakan dalam berproduksi seperti input tenaga kerja, modal dan input lainnya.

Dalam proses pembangunan Indonesia sampai saat ini masih menghadapi masalah perluasan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena masih tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja. Sedangkan di pihak lain kemampuan sektor-sektor non pertanian masih terbatas. Untuk itu upaya dan kebijaksanaan pengembangan industri kecil yang pada umumnya berlokasi di pedesaan sangat diharapkan sekali. Dengan berkembangnya sektor industri pada suatu wilayah, akan memungkinkan wilayah tersebut dapat mengekspor barang dan jasa ke luar wilayahnya. Mekanisme ini pada akhirnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Wilayah Sumatera Barat yang dipilih sebagai daerah penelitian ini memperlihatkan bahwa sub sektor industri skala kecil cukup berkembang. Hal ini terbukti dari kontribusi sub sektor ini dalam menyerap angkatan kerja. Pada tahun 1992 sub sektor industri skala kecil ini mampu menyerap angkatan kerja sektor industri sebesar 89,85% (BPS Sumatera Barat, 1992). Dengan kondisi yang demikian tentu menimbulkan pertanyaan: bagaimana keragaan dan keberadaan industri skala kecil dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh sub sektor tersebut dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat.

Ada 5 kelompok industri skala kecil yang berkembang di Sumatera Barat yaitu:

1. Industri kecil Pengolahan Pangan
2. Industri Kecil Sandang dan Kulit

3. Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan
4. Industri Kecil Kerajinan dan Umum
5. Industri Kecil Logam

Dari masing-masing kelompok industri skala kecil tersebut di atas, yang dipelajari secara detail hanya dibatasi mengenai keragaan umum dan karakteristiknya. Keragaan umum industri skala kecil meliputi jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, investasi dan nilai produksinya. Disamping itu juga dilihat keragaan sub sektor ini dalam hal penyerapan tenaga kerja per unit usaha, investasi per unit usaha, nilai produksi per unit usaha, investasi per tenaga kerja dan nilai produksi per tenaga kerja.

Bertitik tolak dari masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Keragaan industri skala kecil di Sumatera Barat
2. Apakah industri skala kecil merupakan sektor basis dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat.
3. Bagaimana keberadaan industri skala kecil pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat.
4. Bagaimana keberadaan industri skala kecil dibandingkan dengan industri skala menengah dan besar, pertanian dan sektor lainnya pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat.

5. Bagaimana dampak pengembangan industri skala kecil terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, studi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Keragaan industri skala kecil di Sumatera Barat.
2. Keberadaan industri skala kecil dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat.
3. Keberadaan industri skala kecil pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat.
4. Keberadaan industri skala kecil dibandingkan dengan industri skala menengah dan besar, pertanian dan sektor lainnya.
5. Dampak pengembangan industri skala kecil terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat.

Dari studi ini diharapkan dapat diperoleh informasi bagi para pengambil kebijaksanaan di dalam perencanaan pengembangan industri skala kecil pada masa yang akan datang. Disamping itu dari studi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi di dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Dasar Pemikiran Pengembangan Industri Skala Kecil

Seandainya tahun 1950-an sebahagian besar dari negara berkembang telah melaksanakan program industrialisasi dalam upaya memacu pembangunannya. Ada beberapa dasar pemikiran yang melandasinya yaitu : Pertama, ada anggapan yang mengidentikan industrialisasi dengan pembangunan ekonomi. Kedua, industri dianggap sebagai sektor yang cukup dinamis dalam proses pembangunan sehingga dapat mengangkat suatu perekonomian yang kurang berkembang kearah perekonomian yang lebih maju dan dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi serta kesempatan kerja yang penuh (Wong, 1982).

D.Seers dalam pembahasannya mengenai peranan industri dalam pembangunan, menemukan banyaknya salah pengertian tentang hal tersebut. Umpamanya ada anggapan bahwa pembangunan industri lebih penting dari pertanian sehingga menimbulkan tekanan yang berlebihan dalam memandang pentingnya sektor industri. Anggapan lain bahwa industri manufaktur akan dapat menyediakan lapangan kerja secara luas dan juga dianggap bahwa industrialisasi akan dapat menghemat devisa (Livingstone, 1977).

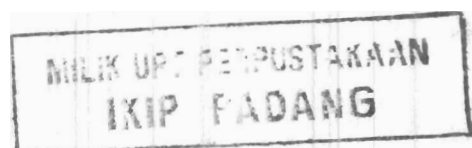
Pada mulanya industrialisasi itu diartikan sebagai suatu proses pembangunan industri modern yang berskala besar. Namun sekitar awal tahun 1960-an, pola pemikiran ini mulai

berubah. dimana perhatian terhadap eksistensi dan peranan industri berskala kecil semakin meningkat. Dua pola pemikiran mulai menampakan diri sebagaimana dilukiskan oleh Myrdal: Pertama. ideologi industrialisasi yang ingin melihat terjadinya revolusi melalui pengembangan industri modern. Kedua. ideologi industrialisasi yang lebih menghendaki dipelihara dan dikembangkannya bentuk-bentuk ekonomi tradisional. Dalam hal ini termasuk di dalamnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga (Raharjo, 1986).

Mochtar Lubis (dalam Erawan, 1985) mengemukakan bahwa industrialisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah berbagai bahan mentah dari sumber-sumber alam, yang diproses menjadi barang jadi. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan usaha peningkatan peranan sektor industri baik industri besar, sedang dan kecil serta kerajinan rumah tangga.

Perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan industri berskala kecil semakin meningkat setelah terjadinya stagnasi ekonomi di pedesaan yang ditandai oleh terjadinya pengangguran dan kemiskinan disana. Hal ini diduga karena industri berskala kecil dianggap sebagai salah satu sektor yang potensinya cukup besar menciptakan kesempatan kerja dan sumber penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin yang pada umumnya berada di pedesaan (Tambunan, 1989).

Irsan Azhari Saleh (1986) mengemukakan bahwa eksistensi industri kecil cukup penting dalam pembangunan suatu wilayah.



Justru itu sektor ini perlu dikembangkan yang didasari atas beberapa pemikiran pokok yaitu: Pertama, industri kecil dan kerajinan rumah tangga berlokasi di pedesaan, sehingga pengembangan sektor ini diduga merupakan suatu alternatif yang baik dalam upaya menampung laju pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat di pedesaan. Kedua, industri kecil menggunakan bahan baku yang dapat disediakan di lingkungan terdekat dan biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin karena tingkat upah yang rendah. Ketiga, harga jual yang relatif rendah dan adanya permintaan terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak dapat diproduksi dengan mesin secara maksimal, merupakan suatu aspek pendukung yang kuat.

Dilihat dari segi pertumbuhan, eksistensi industri kecil memang melahirkan suatu kontroversi, karena untuk tujuan pertumbuhan, maka industri berskala besar yang lebih diharapkan. Namun perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan industri besar akan membawa implikasi terhadap kaburnya aspek pemerataan. Raharjo (1986) mengemukakan bahwa dilihat dari aspek pemerataan maka ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi perlu dikembangkannya industri berskala kecil antara lain: Pertama, industri kecil tidak membutuhkan modal yang besar dan dengan teknologi yang sederhana. Kedua, industri kecil memiliki keterkaitan yang erat dengan mata pencaharian pertanian di pedesaan dan sektor ini

juga dapat menghasilkan barang-barang atau suku cadang yang dibutuhkan oleh industri besar. Dasar pemikiran ini secara ekonomi cukup rasional, setidaknya-tidaknya industri kecil memperoleh tempat dalam pertumbuhan untuk pemerataan kesempatan berusaha baik secara nasional maupun secara sektoral.

B. Pembangunan Wilayah

Pada hakekatnya pembangunan wilayah (Regional Development) merupakan pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi wilayah tersebut serta harus tunduk pada peraturan yang berlaku (Sandy, 1982c).

Dalam pembangunan wilayah, maka konsep wilayah (regional) merupakan aspek penting yang perlu didefinisikan secara tegas, karena konsep ini membawa implikasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Banyak para ahli ekonomi regional yang mengemukakan definisi tentang wilayah. Sandy (1982 a) mengemukakan bahwa kata wilayah yang berkaitan dengan pembangunan suatu wilayah, setidaknya-tidaknya mempunyai dua makna yaitu: Pertama, wilayah yang objektif, maksudnya adalah suatu wilayah oleh para perencana dibagi habis ke dalam beberapa wilayah pembangunan. Kedua, wilayah subjektif, maksudnya adalah pengwilayaan merupakan suatu cara untuk mengenal masalah. Hal ini berarti adanya usaha untuk melakukan klasifikasi. Wilayah subjektif

ini ada dua jenis yaitu: 1) wilayah homogen yaitu wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama secara fisik dan sosial ekonomi. 2) wilayah fungsional yaitu wilayah yang didasarkan atas adanya hubungan fungsional antara unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam wilayah tersebut.

Sukirno (1976) membedakan wilayah atas tiga pengertian yaitu wilayah homogen, nodal dan administrasi. Wilayah homogen adalah suatu wilayah dimana kegiatan ekonomi yang berlaku diberbagai pelosok ruang mempunyai sifat yang sama. Persamaan sifat yang dimiliki oleh suatu wilayah dapat dilihat dari segi pendapatan perkapita penduduknya atau dari segi struktur ekonominya. Wilayah nodal merupakan suatu wilayah sebagai ruang ekonomi dikuasai oleh beberapa pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan wilayah administrasi maksudnya adalah suatu wilayah yang didasarkan atas pembahagian administrasi pemerintahan.

Dari beberapa batasan di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah suatu ruang ekonomi yang berada di bawah suatu tingkat pemerintahan tertentu seperti propinsi, kabupaten atau kecamatan. Dalam penelitian ini wilayah administrasi diartikan sebagai wilayah perencanaan.

Berkaitan dengan wilayah perencanaan, Glasson (1974) mengemukakan bahwa ada dua pengertian mengenai wilayah perencanaan yaitu pengertian objektif dan pengertian subjektif. Menurut pengertian objektif, maka wilayah dipandang sebagai suatu kesatuan tersendiri, suatu kebulatan riil yang

dapat diidentifikasi atau dipetakan. Sedangkan menurut pengertian subjektif, wilayah dianggap sebagai alat diskripsi, wilayah didefinisikan menurut kriteria tertentu.

Dalam pelaksanaan program pembangunan pada suatu wilayah, harus ada suatu institusi yang dapat menuntun arah pembangunan tersebut dan pembangunan tidak boleh menyimpang dari institusi yang ada. Di Indonesia arah pembangunan nasional dirumuskan dalam suatu sidang MPR dan naskah perumusan dituangkan dalam bentuk GBHN. Kemudian kabinet menetapkan hal-hal yang dianggap penting diprioritaskan. Dengan demikian pembangunan wilayah juga harus mencakup unsur tersebut di atas (Sandy, 1982c).

Pembangunan harus dilihat dalam arti yang dinamis, bukan dilihat sebagai suatu konsep yang statis. Pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang tanpa akhir. Tjokroamidjojo (1980) melihat proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial budaya. Senada dengan itu Todaro (1983) juga mengemukakan bahwa nilai hakiki dari pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yang meliputi aspek peningkatan kebutuhan hidup, peningkatan harga diri sebagai manusia dan bebas dari perbudakan.

Dalam setiap program pembangunan ditujukan ke arah perubahan yang positif dan dalam pelaksanaannya merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan suatu interaksi antara

alam, sosial ekonomi dan faktor politik. Daerah-daerah yang kurang memiliki sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, laju pembangunan cenderung lambat dibandingkan dengan daerah yang kaya akan sumberdaya. Implikasi akhir dari kondisi ini adalah ketidakseimbangan struktural antara daerah semakin tajam.

Peranan aktif dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghilangkan ketidakseimbangan pembangunan antar berbagai daerah yang dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan. Myrdal (dalam Sukirno, 1976), mengemukakan bahwa apabila pemerintah tidak secara aktif campur tangan dalam proses pembangunan, maka hal ini akan menimbulkan akibat buruk bagi pembangunan selanjutnya.

Untuk menghindarkan diri dari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dalam proses pembangunan wilayah, maka sangat diperlukan perencanaan wilayah. Glasson (1974) mengemukakan bahwa pada dasarnya perencanaan wilayah adalah sama dengan perencanaan lainnya. Semua perencanaan pada hakekatnya mencakup suatu proses yang berurutan.

Dalam proses perencanaan wilayah, ada beberapa kendala yang ditemukan seperti keadaan data yang terbatas, kelembagaan daerah yang lemah, kewenangan daerah yang terbatas dan keterbukaan ekonomi daerah yang jauh lebih leluasa dari ekonomi bangsa dan negara (Richardson, 1977). Namun demikian pemerintah harus berperan aktif dalam mengadakan perencanaan dan program pembangunan di

wilayahnya terutama sekali: 1) membantu meneliti proyek-proyek yang akan dibangun di daerah. 2) untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dan administrasi yang efisien. 3) memberikan pengarahan kepada pihak swasta, sehingga kegiatan investasi dapat dilaksanakan secara lebih efisien bagi pembangunan daerah (Sukirno, 1976).

Keberadaan suatu lembaga sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Sandy (1983) mengemukakan bahwa di Indonesia ada semacam sistem nasional untuk penyelenggaraan pembangunan yaitu MPR, Presiden, DPR dan BAPPENAS. Masing-masing unsur mempunyai tugas-tugas tertentu sesuai dengan yang telah digariskan. Timbergen (1979) menyatakan bahwa proses produktif dari lembaga ini mempunyai beberapa aspek yang dapat digolongkan dalam fungsi, cara kerja, prosedur dan organisasi. Fungsi utama lembaga ini adalah menyusun rencana dan fungsi kedua melaksanakan penelitian pendahuluan, menyusun peraturan dan data baku untuk lembaga perencanaan yang lebih rendah tingkatannya. Mengingat pentingnya keberadaan pembangunan wilayah sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka perhatian terhadap pembangunan wilayah dewasa ini semakin berkembang. Seiring dengan itu juga berkembang teknik-teknik analisis pembangunan wilayah. Richardson (1977) telah menyajikan teknik-teknik analisis pembangunan wilayah antara lain: 1) multiplier regional.

2) basis ekonomi, 3) analisis input output, 4) analisis manfaat dan analisis keunggulan komparatif. Dari analisis regional yang telah dikemukakan, maka analisis basis ekonomi merupakan salah satu metode pendekatan yang dapat menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah melalui pengkajian sektor industri basis. Dengan model ini akan dapat diketahui antara lain: 1) aktivitas ekspor daerah, 2) meramalkan dengan berbagai cara pertumbuhan aktivitas tersebut, 3) mengevaluasi akibat selanjutnya dari aktivitas ekspor tambahan terhadap aktivitas bukan ekspor (Hoover, 1977). Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka model basis ekonomi sangat sesuai untuk melihat pertumbuhan suatu wilayah, terutama sekali untuk wilayah yang relatif kecil.

C. Konsep Basis Ekonomi

Konsep ini pada mulanya dikembangkan oleh North dan kemudian dilanjutkan oleh Tibout (Richardson, 1977). Menurut Glasson (1974) salah satu konsep yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah basis ekonomi. Konsep ini dapat menjelaskan dan mengidentifikasi maju mundurnya suatu wilayah. Disamping itu konsep ini juga dapat menentukan arah pembangunan wilayah secara keseluruhan. Sedangkan aktivitas yang bukan basis hanya merupakan akibat dari seluruh pembangunan wilayah.

Model basis ekonomi menyederhanakan perekonomian menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor bukan basis

(Glasson, 1974). Kegiatan sektor basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakat atau memasarkan barang dan jasa kepada mereka yang datang dari luar perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan sektor basis ini sangat penting sekali artinya dalam menciptakan permintaan terhadap faktor produksi dan pendapatan wilayah serta menciptakan permintaan atas produksi industri lokal yang dihasilkannya, terutama sekali digunakan untuk permintaan pasar di sekitar wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama, dimana setiap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak secara berlipat ganda terhadap perubahan perekonomian suatu wilayah. Di pihak lain sektor non basis adalah kegiatan sektor ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam wilayah atau oleh sektor ekonomi basis yang berada dalam lingkup perekonomian wilayah.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah menurut model basis ekonomi ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut dalam melakukan ekspor, berupa barang dan jasa termasuk tenaga kerja dan juga dapat berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut.

North (dalam Marpaung, 1984) mengemukakan bahwa peranan dari ekspor ini akan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dan menciptakan permintaan atas produksi lokal. Senada dengan ini Emery (dalam Sukirno, 1976) juga mengemukakan bahwa

sektor ekspor dapat memberikan sumbangan langsung dan tidak langsung bagi pembangunan wilayah. Sumbangan langsung dapat berupa: 1) Kenaikan ekspor akan dapat mengimpor barang modal yang penting bagi pembangunan wilayah. 2) Pengembangan ekspor berarti mengalokasikan dana kepada sektor yang paling efisien untuk dapat bersaing dengan daerah lain. 3) Kegiatan ekspor akan dapat memperluas pasar untuk produksi dalam negeri dan memungkinkan untuk memperluas skala industri daerah yang bersangkutan. Sedangkan sumbangan tidak langsung dapat berupa: 1) Kegiatan ekspor akan dapat mendorong dan meningkatkan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar daerah. 2) Perkembangan ekspor akan memudahkan masuknya inovasi dalam teknologi.

Selanjutnya Emery (dalam Marpaung, 1984) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekspor sebesar 2.5 % akan dapat menciptakan kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1 %. Oleh karena itu dengan kegiatan ekspor yang semakin meningkat akan dapat meningkatkan pendapatan dari luar wilayah dan selanjutnya akan dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa di dalam wilayah tersebut. akhirnya kegiatan ekspor akan dapat meningkatkan aktivitas bukan basis. Atas dasar inilah sektor basis dianggap sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan suatu wilayah.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya sektor basis. Kemajuannya antara lain disebabkan

oleh perkembangan jaringan transportasi, perkembangan permintaan dan pendapatan dari daerah lain, perkembangan teknologi dan prasarana lainnya. Sedangkan kemunduran sektor basis disebabkan oleh perubahan permintaan dari luar daerah, kehabisan cadangan sumberdaya alam dan perkembangan teknologi yang dapat merubah komposisi input.

Untuk mempelajari apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau bukan basis dalam suatu wilayah, dapat digunakan metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung (Glasson, 1974). Dengan metode pengukuran langsung dilakukan melalui survei secara langsung dalam rangka mengidentifikasi sektor mana yang merupakan basis dan mana yang bukan basis. Disatu pihak melalui pendekatan ini memang dapat ditentukan sektor basis secara tepat, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar. Atas dasar pertimbangan ini para pakar ekonomi wilayah merekomendasikan penggunaan metode pengukuran tidak langsung.

Glasson (1974) mengemukakan beberapa metode pengukuran tidak langsung yaitu: 1) metode melalui pendekatan asumsi, 2) metode kuosien lokasi, 3) kombinasi antara asumsi dan kuosien lokasi, 4) metode kebutuhan minimum. Dari ke empat metode pengukuran tidak langsung tersebut, Glasson (1974) menyarankan untuk memakai metode kuosien lokasi dalam menentukan basis tidaknya suatu sektor ekonomi dalam wilayah tertentu.

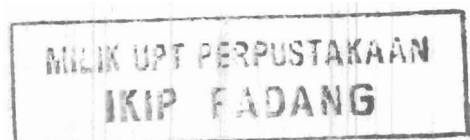
Menurut Richardson (1977), metode kuosien lokasi merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja sektor ke i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan atau tenaga kerja total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan atau tenaga kerja sektor ke i pada tingkat wilayah yang lebih tinggi. Penentuan basis tidaknya suatu sektor didasarkan atas nilai indeks kuosien lokasi, jika nilai indeks ini besar daari satu, sektor tersebut dikatakan basis, sedaangkan jika kecil daaari satu dikatakan sektor non basis. Bendavid (1991) memformulasikan model ini sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_r/X_n}{RV_r/RV_n} \dots\dots\dots(1)$$

- LQ = Kuosien Lokasi
- Xr = Pendapatan atau tenaga kerja sektor X pada tingkat wilayah.
- Xn = Total pendapatan atau tenaga kerja pada tingkat wilayah
- RVr = Pendapatan atau tenaga kerja sektor X pada tingkat nasional
- RXr = Total pendapatan atau tenaga kerja pada tingkat nasional

Dengan model di atas pola aktivitas ekonomi lokal digunakan sebagai kerangka acuan guna menunjukkan pentingnya kegiatan suatu sektor ekonomi bagi perekonomian lokal secara relatif terhadap perekonomian wilayah.

Selanjutnya Glasson (1974) mengemukakan bahwa berdasarkan model persamaan (1) dapat dicari indeks surplus relatif dan absolut dari sektor ekonomi basis. Model relatif



digunakan untuk membandingkan berbagai sektor antar wilayah. Perhitungannya adalah dengan cara mengurangi sumbangan relatif suatu sektor terhadap pendapatan antara wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar. Indeks ini pada dasarnya mengukur perbedaan spesialisasi lokal dengan wilayah. Secara matematik indeks tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ISR = (X_r/X_n) - (R_{Vr}/R_{Vn}) \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

ISR = Indeks surplus relatif pendapatan

X_r = Pendapatan sektor X pada tingkat wilayah

X_n = Total Pendapatan pada tingkat wilayah

R_{Vr} = Pendapatan sektor X pada tingkat nasional

R_{Vn} = Total pendapatan pada tingkat nasional

Selanjutnya model absolut mengukur secara langsung jumlah absolut surplus pendapatan yang terjadi akibat aktivitas suatu sektor ekonomi. Glasson (1974) menyederhanakan perhitungan model ini dengan rumus sebagai berikut:

$$ISA = \frac{ISR}{100} \times X_n \dots\dots\dots(3)$$

D. Analisis Dampak Pendapatan dan Tenaga Kerja

Pada dasarnya pengembangan industri skala kecil dapat menyentuh kehidupan masyarakat lapisan terbawah. Dampak tersebut dapat berupa peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan wilayah. Sesuai dengan tujuan studi

ini, dampak tersebut menurut Bendavid (1991) dapat diukur dengan menggunakan konsep multiplier basis ekonomi yang terdiri dari multiplier pendapatan dan multiplier tenaga kerja. Berdasarkan konsep teori ekonomi, multiplier merupakan efek pelipat gandaan pendapatan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pengeluaran dalam masyarakat. Besarnya perubahan pendapatan tersebut tergantung kepada besarnya porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Secara teori posi ini disebut dengan "Marginal Propensity To Consume" (MPC).

Dalam penerapannya Bendavid (1991) mengemukakan bahwa jika proporsi pendapatan yang dibelanjakan di dalam wilayah sama dengan "r", maka pengaruh total pendapatan dari ekspor terhadap total pendapatan wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = (1 + r^2 + r^3 + r^n)YB \dots\dots\dots(4)$$

Oleh karena nilai r , maka persamaan (4) di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{1 - r} \cdot YB \dots\dots\dots(5)$$

Y = Perubahan dalam total pendapatan wilayah

r = proporsi setiap pendapatan basis yang dibelanjakan dalam wilayah

YB = Perubahan yang terjadi dalam pendapatan dalam sektor basis

n = perputaran pembelanjaan

Ada dua analisa dalam menentukan multiplier basis ekonomi yaitu analisis jangka pendek danb jangka panjang. Kedua analisis tersebut diturunkan dari angka pengganda basis ekonomi yang paling sederhana yaitu:

$$t = \frac{Y_n}{Y} \dots\dots\dots(6)$$

Y = Total pendapatan wilayah

Y_n = Pendapatan sektor non basis

t = Proporsi total pendapatan yang disebabkan oleh sektor lokal dalam perekonomian wilayah.

Berdasarkan persamaan (3) dapat dirumuskan multiplier pendapatan jangka pendek yaitu:

$$M = \frac{1}{1 - YN/Y} \dots\dots\dots(7)$$

Ratio antara YN dengan Y menggambarkan proporsi dari total pendapatan wilayah yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk dalam suatu perekonomian wilayah. Ratio ini menurut Glasson (1974) menunjukkan adanya dua kecenderungan yaitu kecenderungan konsumsi lokal dan kecenderungan kebocoran pendapatan keluar wilayah.

Kecenderungan konsumsi lokal (CL) merupakan persentase dari total pendapatan wilayah yang dikonsumsi secara lokal. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{CL}{Y_N + Y_B} \dots\dots\dots(8)$$

CL merupakan jumlah uang yang dibelanjakan secara lokal untuk barang dan jasa. Namun demikian, tidak semua pendapatan yang dibelanjakan secara lokal adalah merupakan pendapatan lokal. Tetapi sebahagian dari pendapatan basis dipergunakan untuk membeli barang impor, membayar upah pekerja dari luar wilayah serta pembayaran faktor input lainnya yang berasal dari luar wilayah.

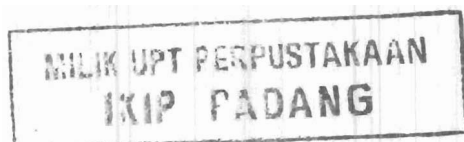
Kecenderungan kebocoran pendapatan keluar wilayah merupakan aspek lain yang perlu diperhitungkan. Untuk menghitung kebocoran ini dibutuhkan faktor lain yaitu kecenderungan membelanjakan pendapatan lokal. Kecenderungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$YN/CL \dots\dots\dots(9)$$

Dalam hal ini diasumsikan bahwa semua YN dihasilkan oleh penduduk wilayah yang bersangkutan. Berarti kebocoran pendapatan akan terjadi jika penduduk dari wilayah itu memperoleh pendapatan bukan basis dari luar wilayah yang diteliti.

Kedua kecenderungan di atas, bila dikombinasikan akan menunjukkan hubungan antara pendapatan, pengeluaran konsumsi lokal dan pendapatan sektor basis. Hasil dari kedua kecenderungan tersebut adalah :

$$YN/Y = \frac{CL}{YN+YB} \times \frac{YN}{CL} = \frac{YN}{YN + YB} \dots\dots\dots(10)$$



Dengan memperhatikan kedua kecenderungan di atas, multiplier pendapatan jangka pendek dapat dirumuskan :

$$MS = \frac{1}{1 - \left(\frac{CL}{YN + YB} \right) \times \frac{YN}{CL}} \dots \dots \dots (11)$$

Kemudian dalam multiplier pendapatan jangka panjang, dimasukan faktor kecenderungan investasi terhadap barang lokal yang merupakan persentase pendapatan yang diinvestasikan pada barang-barang modal. Kecenderungan ini dapat dirumuskan:

$$\frac{YI}{YN + YB} \dots \dots \dots (12)$$

YI merupakan pendapatan lokal yang diinvestasikan dalam barang-barang modal. Namun kenyataannya tidak semua pengeluaran lokal untuk investasi tersebut dilakukan dalam wilayah, tetapi ada barang-barang modal yang diimpor dari luar wilayah, akibatnya pengeluaran investasi dalam wilayah menjadi berkurang. Dengan demikian proporsi pendapatan lokal yang diinvestasikan untuk barang-barang modal didalam wilayah dapat dirumuskan :

$$\frac{YI - MI}{YI} \dots \dots \dots (13)$$

MI = pengeluaran lokal untuk impor barang modal.

Bila kedua faktor di atas digabungkan, hal ini

merupakan proporsi pengeluaran investasi lokal yang tinggal di dalam wilayah terhadap total pendapatan wilayah. Persamaan tersebut dapat dirumuskan:

$$\frac{YI}{Y_N + Y_B} \times \frac{YI - MI}{YI} = \frac{YI - MI}{Y_N + Y_B} \dots\dots\dots(14)$$

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka multiplier pendapatan jangka panjang dapat dirumuskan :

$$ML = \frac{1}{1 - \left(\frac{CL}{Y_N + Y_B}\right) \times \frac{Y_N}{CL} + \frac{YI}{Y_N + Y_B} \times \frac{YI - MI}{YI}}$$

$$= \frac{1}{1 - \left(\frac{Y_N + YI - MI}{Y_N + Y_B}\right)} \dots\dots\dots(15)$$

Dampak lain yang bisa ditimbulkan oleh pengembangan suatu sektor ekonomi, sepertinya sub sektor industri skala kecil adalah kemampuannya dalam menverap pertumbuhan angkatan kerja. Pengukurannya menurut Glasson (1974) dapat dipakai konsep multiplier tenaga kerja. Konsep ini dapat digunakan untuk memprovokasi dan mengevaluasi jumlah total kesempatan kerja pada masa yang akan datang. Peranan ini dapat dijelaskan dengan menyelidiki pertumbuhan kesempatan kerja dengan adanya sektor basis dalam wilayah tertentu.

Bendavid (1991) dan Glasson (1974) merumuskan multiplier tenaga kerja sebagai berikut:

$$\text{Multiplier tenaga kerja} = \frac{\text{total tenaga kerja wilayah}}{\text{Tenaga kerja sektor basis}}$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dihitung pertumbuhan kesempatan kerja pada suatu wilayah dengan mengalikan multiplier tenaga kerja yang telah dihitung dengan pertumbuhan kesempatan kerja wilayah.

E. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya pembangunan industri merupakan bahagian dari usaha pembangunan jangka panjang untuk merubah struktur ekonomi yang tidak seimbang kearah struktur ekonomi yang lebih seimbang. Dengan pembangunan sektor industri diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa serta memanfaatkan sumber alam dan energi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tujuan di atas dicapai dengan menerapkan berbagai kebijaksanaan dibidang industri. Pada mulanya dilakukan import substitution strategy kemudian pada akhirnya ditempuh strategi export oriented. Semua strategi ini telah dapat merangsang pertumbuhan industri dalam negeri yang peranannya diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja.

Dengan bertumbuhnya sektor industri pada suatu wilayah, terutama sekali industri kecil dan kerajinan rumah tangga, maka diharapkan wilayah tersebut mampu melakukan ekspor komoditi yang dihasilkan ke luar wilayah yang

bersangkutan. Kegiatan ekspor ini akan menimbulkan dampak ekonomi terhadap pembangunan wilayah baik berupa peningkatan pendapatan maupun peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dampak ini dapat ditelusuri melalui pendekatan model ekonomi basis. Sampai seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ekspor (sektor basis) terhadap pembangunan wilayah dapat diukur dengan menggunakan konsep multiplier pendapatan dan tenaga kerja. Dengan konsep ini juga dapat diramalkan pertumbuhan total pendapatan wilayah dan pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah yang diteliti.

Dalam studi ini penentuan kegiatan sektor basis dan non basis dilakukan dengan menggunakan metode Kuosien Lokasi (LQ). Metode tersebut menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor (industri) di wilayah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas.

Setiap wilayah memiliki kondisi alamiah yang berbeda untuk dapat berkembangnya suatu sektor ekonomi. Perbedaan kondisi alamiah mengakibatkan terjadinya kegiatan ekspor dan impor antar wilayah. Dalam hal ini metode LQ mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu wilayah dalam kegiatan yang diteliti.

Industri basis yang dapat berperan sebagai penggerak utama pembangunan suatu wilayah, menghasilkan barang dan jasa untuk pasaran lokal dan luar wilayah yang bersangkutan. Ekspor yang dilakukan ke luar wilayah akan mendatangkan arus

pendapatan ke dalam wilayah. Arus pendapatan tersebut akan menimbulkan kenaikan konsumsi dan investasi di wilayah yang bersangkutan. Hal ini pada akhirnya memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jika pada wilayah tersebut tidak ada lagi pengangguran, maka wilayah tersebut mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja dari luar wilayah yang mencari pekerjaan.

Kenaikan pendapatan pada wilayah tersebut tidak hanya dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil industri basis saja tetapi juga dapat menaikkan permintaan terhadap industri non basis dan hal tersebut akan memungkinkan terjadinya kenaikan investasi pada industri non basis. Penanaman modal yang dilakukan pada industri non basis merupakan investasi yang tidak langsung sebagai akibat kenaikan investasi pada industri basis.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka industri skala kecil diduga mempunyai dampak terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat dan keragaannya cenderung berbeda pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Batasan dan Ukuran Operasional

Pada bahagian ini dikemukakan beberapa batasan dan ukuran operaasional dari konsep yang dipakai dalam studi ini.

1. Keragaan, maksudnya adalah karakteristik dan profil industri skala kecil dalam hal perkembangan unit usaha, nilai produksi, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi. Semua besaran ini dilihat per unit usaha dan per tenaga kerja
2. Industri skala kecil, maksudnya adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah bahan dasar menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi baik secara mekanis maupun dengan tangan. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 1 sampai 20 orang, dengan investasi sebanyak 70 juta kebawah.
3. Dampak, maksudnya adalah pengaruh ekonomi yang ditimbulkan oleh industri skala kecil terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat. Dampak itu berupa peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja wilayah Sumatera Barat. Kedua dampak ini diukur dengan menggunakan multiplier pendapatan dan tenaga kerja. Kedua ukuran tersebut menggunakan pendapatan dan tenaga kerja sebagai ukuran.
4. Pembangunan wilayah, maksudnya adalah pembangunan yang

dilaksanakan pada wilayah administrasi tertentu. Dalam studi ini dipilih Sumatera Barat sebagai wilayah studi.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan pada bahagian terdahulu, maka lokasi penelitian ini adalah propinsi Sumatera Barat yang mencakup seluruh daerah tingkat II. Studi ini pendekatannya bersifat makro, oleh karena itu seluruh industri skala kecil di Sumatera Barat dijadikan sebagai objek studi.

C. Jenis dan Sumber Data

Seperti telah dikemukakan pada bahagian terdahulu bahwa studi ini menggunakan model ekonomi basis dan analisa deskripttif. Untuk pelaksanaan kedua model analisis ini diperlukan data skunder. Data skunder yang diperlukan untuk analisis model ekonomi basis meliputi : 1) Pendapatan sektor industri skala kecil untuk tingkat Sumatera Barat, daerah tingkat II dan Indonesia (nasional). 2) Total pendapatan wilayah pada tingkat Sumatera Barat, daerah tngkat II dan Indonesia. Data ini dikumpulkan secara langsung malalui Laporan dan Potensi Wilayah dari Dinas Perindustrian dan Jawatan lainnya seperti Kantor Dinas Perindustrian dan Kantor Biro Pusat pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Validasi data, yaitu memeriksa konsistensi data yang dikumpulkan baik data skunder maupun primer.
2. Coding dan Tabulasi data yang meliputi menyusun, mengolah dan mengagregasikan data sehingga siap untuk dianalisis.
- 3 Analisa data dengan menggunakan model basis ekonomi dan analisa deskripttif

Secara lebih rinci metode analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sub sektor industri skala kecil merupakan sektor basis dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat. digunakan model Kuosien Lokasi dengan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} = \frac{e_i/e_t}{E_i/E_t} \dots \dots \dots (16)$$

dimana :

LQ = Kuosien Lokasi

v_i = Pendapatan atau tenaga kerja sektor industri skala kecil di Sumatera Barat.

v_t = Total pendapatan atau tenaga kerja di Sumatera Barat.

V_i = Pendapatan atau tenaga kerja sektor industri skala kecil di Indonesia.

V_t = Total pendapatan Indonesia

2. Untuk mengetahui dampak industri skala kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat, digunakan analisis multiplier pendapatan jangka pendek dengan persamaan:

$$MS = \frac{1}{1 - \left(\frac{YN}{YN + YB} \right)} = \frac{1}{1 - YN/Y} \dots\dots\dots (17)$$

MS = Multiplier pendapatan jangka pendek

Y = Total pendapatan wilayah Sumatera Barat

YN = Pendapatan Non Basis

YB = Pendapatan sektor basis

3. Untuk mengetahui besaran multiplier pendapatan jangka panjang dari pengembangan industri skala kecil, dipakai persamaan berikut:

$$ML = \frac{1}{1 - \left(\frac{YN + YI - MI}{YN + YB} \right)} \dots\dots\dots (18)$$

dimana:

ML = Multiplier pendapatan jangka panjang

YI = Pendapatan lokal yang diinvestasikan untuk barang modal

MI = Pengeluaran lokal untuk barang modal

4. Untuk mengetahui dampak industri skala kecil terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, digunakan

analisis multiplier tenaga kerja dengan persamaan sebagai berikut:

$$MT = \frac{TN + TB}{TB} \dots\dots\dots (19)$$

dimana :

MT = Multiplier tenaga kerja

TN = Jumlah tenaga kerja di sektor non basis

TB = Jumlah tenaga kerja di sektor industri skala kecil di Sumatera Barat.

5. Untuk melihat keragaan industri skala kecil perbandingannya untuk setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat. digunakan teknik tabulasi sesuai dengan keperluan studi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Keragaan Industri Skala Kecil di Sumatera Barat

Sub sektor industri skala kecil di Sumatera Barat, merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat. Selama periode 1983-1991, sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 5,7% rata-rata pertahun dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat. Kontribusi ini relatif lebih besar dibandingkan dengan sub sektor industri skala besar dan sedang, hanya 4,82% rata-rata pertahun selama periode yang sama. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, industri skala kecil juga memberikan saham yang relatif besar. Pada tahun 1993 kelompok industri logam dasar, Kimia Dasar dan aneka industri hanya mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 10.899 orang, sedangkan kelompok industri skala kecil mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 40.160 orang. (Laporan tahunan Kanwil Perindustrian Sumatera Barat, 1993).

Berdasarkan angka-angka di atas, memberikan isyarat bahwa sub sektor industri skala kecil perlu mendapat perhatian oleh para pengambil keputusan sub sektor ini, mengingat relatif pentingnya peran industri skala kecil dalam struktur perekonomian Sumatera Barat. Berarti, sangat perlu

dilakukan berbagai macam upaya untuk mendorong perkembangan sub sektor tersebut pada masa mendatang. Oleh karena itu data dan informasi tentang keragaan industri skala kecil sangat bermanfaat sekali dan dapat dijadikan sebagai input segar dalam menformulasikan berbagai macam kebijaksanaan konkrit yang siap untuk dioperasikan. Studi ini dilakukan disamping untuk melihat keragaan industri skala kecil, juga untuk melihat apakah sub sektor industri skala kecil merupakan sektor ekonomi yang cukup potensial dikembangkan di Sumatera Barat.

1. Keadaan dan Perkembangan Industri Skala Kecil di Sumatera Barat.

Dalam proses pembangunan suatu wilayah, melalui penelitian daerah sudah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai di wilayah Sumatera Barat. Sektor industri pengembangannya ditujukan untuk ikut memperkuat struktur perekonomian nasional dengan mempertimbangkan potensi yang ada, baik potensi alamiah maupun potensi insaniah. Hal ini berarti bahwa pengembangan setiap sektor ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah sehingga tercipta kaitan yang erat antar industri dan antar sektor.

Sesuai dengan kondisi wilayah Sumatera Barat, pengembangan sektor industri, disamping diadakan pada industri skala menengah dan besar juga diarahkan pada pengembangan industri skala kecil. Industri skala kecil yang diharapkan pengembangannya adalah industri - industri yang erat

kaitannya dengan sektor pertanian sehingga dalam jangka panjang terwujud struktur perekonomian yang dilandasi oleh sistem agroindustri yang merupakan salah satu sub sistem dari sistem agribisnis.

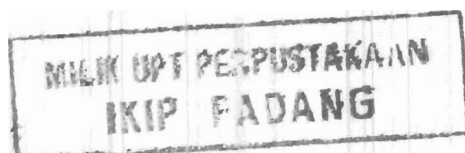
Dengan adanya kebijaksanaan yang terarah dan terpadu selama Pelita IV dan V dalam pengembangan industri skala kecil. sub sektor ini telah dapat memberikan kontribusi yang semakin meningkat dalam proses pembangunan Sumatera Barat, terutama sekali dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Hal ini terbukti dari keragaan industri skala kecil yang meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam hal unit usaha, produksi, investasi maupun penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya keragaan perkembangan industri skala kecil disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2 : Keragaan Perkembangan Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988-1993

Tahun	UU	TK(orang)	I (000)	NP (000)
1988	36.068	94.335	22.203.659	162.647.755
1989	36.801	96.939	21.614.890	185.811.572
1990	37.787	101.537	25.737.472	195.924.305
1991	38.767	103.684	22.488.940	197.731.561
1992	38.736	105.408	27.034.100	243.481.421
1993	40.160	108.983	33.634.184	260.107.477
Perkem bangan	1,89%	2,58%	8,58%	9,99%

Sumber: Laporan Tahunan Kanwil Perindustrian Sumatera Barat 1993
Keterangan:

UU = Unit Usaha
TK = Tenaga Kerja
I = Investasi
NP = Nilai Produksi



Tabel 2 memberikan gambaran bahwa, keragaan industri skala kecil di Sumatera Barat selalu menunjukkan perkembangan selama periode analisa, baik dalam hal unit usaha perkembangannya (1,89%), penyerapan tenaga kerja (2,58%), nilai investasi (8,58%) maupun nilai produksi (9,99%). Hal ini pada gilirannya mengakibatkan semakin meningkatnya sumbangan sektor tersebut terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat. Dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor industri skala kecil, selama periode 1983 sampai 1991 nilai tambah yang dihasilkan berkembang 6,78% rata-rata per tahun. Sedangkan pada priode yang sama sub sektor industri skala kecil memberikan kontribusi sebesar 5,72% terhadap pembentukan Pendapatan Wilayah Sumatera Barat. Dari dimensi tata ruang wilayah, perkembangan ini mungkin disebabkan oleh kondisi dan potensi wilayah Sumatera Barat yang sesuai bagi pengembangan industri skala kecil. Dugaan ini didasarkan atas suatu proposisi bahwa perkembangan suatu sektor ekonomi pada wilayah tertentu sangat ditentukan oleh potensi wilayah tersebut. Dengan demikian keragaan setiap sektor ekonomi pada setiap wilayah cenderung berbeda, sehingga kebijaksanaan pengembangan sektor ekonomi tidak harus sama bagi setiap wilayah.

Bila data pada Tabel 2 di atas ditelusuri lebih jauh, ternyata selama periode analisa perkembangan unit usaha hanya 1,89% dan penyerapan tenaga kerja 2,58%. Namun nilai investasi dan nilai produksi perkembangannya masing-masing

8.58% dan 9.99%. Berarti terjadi perbedaan yang agak tajam antara perkembangan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja dengan perkembangan nilai investasi dan nilai produksi. Data ini memberikan indikasi bahwa selama periode analisa, mungkin terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam bentuk pembelian barang modal baru. Peningkatan kapasitas produksi ini, nampaknya diikuti oleh peningkatan nilai produksi. Berkaitan dengan nilai produksi, ada dua kemungkinan. Pertama, naiknya nilai produksi mungkin disebabkan oleh naiknya harga produksi. Kedua, naiknya kapasitas produksi terpasang. Penelitian lanjutan dalam hal ini sangat diperlukan terutama sekali untuk melihat skala usaha industri skala kecil di Sumatera Barat.

Keragaan lain yang perlu dikemukakan adalah karakteristik dari subsektor ini. Maksudnya bagaimana kemampuan industri skala kecil dalam menyerap tenaga kerja perunit usaha, nilai investasi dan nilai produksi per unit usaha, serta nilai investasi dan nilai produksi per tenaga kerja. Berdasarkan keragaan ini dapat dilihat kecenderungan dari sub sektor ini, padat modal atau padat karya dan kecenderungan nilai investasi per unit usaha dan per tenaga kerja. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah nilai investasi yang rendah per unit usaha tapi dapat menghasilkan nilai produksi yang relatif tinggi demikian sebaliknya. Pada Tabel berikut disajikan keragaan industri skala kecil yang berkaitan dengan aspek tersebut.

Tabel 3 : Keragaan Industri Skala Kecil Dalam Hal Tenaga Kerja Per-Unit Usaha. Investasi Per-Unit Usaha Produksi Per Unit Usaha. Investasi dan Produksi Per Tenaga Kerja. 1988-1993.

Tahun	TK/UU	I/UU(000)	P/UU (000)	I/TK(000)	P/TK (1000)
1988	2	615,60	4.509,47	235,37	1.724,15
1989	2	587,35	5.049,09	222,79	1.916,74
1990	2	681,11	5.184,96	249,90	1.916,59
1991	2	580,10	5.100,51	216,90	1.907,06
1992	2	697,90	6.285,66	256,47	2.309,90
1993	2	837,50	6.476,77	308,62	2.386,68
Rata	2	666,59	5.434,41	248,37	2.029,03

Sumber: Laporan tahun Kanwil Perindustrian Sumatera Barat 1993

Keterangan:

- TK/UU = Tenaga kerja per unit usaha
- I/UU = Investasi per unit usaha
- P/UU = Produksi per unit usaha
- I/TK = Investasi per tenaga kerja
- P/TK = Produksi per tenaga kerja

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa kemampuan sub sektor industri skala kecil dalam menyerap tenaga kerja selama periode analisa rata-rata 2 orang per unit usaha. Kondisi ini barangkali ada kaitannya dengan kapasitas produksi terpasang (nilai investasi, dalam hal ini berkisar antara Rp. 580.100 sampai RP. 837.500 dan rata-rata Rp. 666.590 per usaha. Data ini dapat memberikan indikasi kepada kita bahwa industri skala kecil tidak memerlukan biaya investasi yang begitu besar, hal ini barangkali yang menyebabkan sektor tersebut selalu menunjukkan perkembangan di Sumatera Barat (lihat Tabel 2). Implikasinya adalah upaya

untuk meningkatkan investasi dan memberikan fasilitas kredit kepada sub sektor ini sangat di perlukan sekali. Dengan upaya ini diharapkan industri skala kecil dapat memberikan kontribusi yang semakin meningkat baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan wilayah.

Berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, data pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa diperlukan investasi sebesar Rp 248.370 per tenaga kerja. Data ini juga dapat memberikan petunjuk bahwa perluasan kesempatan kerja ada kaitannya dengan pertumbuhan investasi pada sektor ekonomi tertentu, ceteris paribus. Oleh karena itu memberikan kemudahan-kemudahan seperti fasilitas kredit, subsidi dan pembiayaan usaha skala kecil secara terarah dan terpadu merupakan suatu hal yang sangat perlu diupayakan. Hal ini sangat relevan, mengingat masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja non pertanian di pedesaan.

Satu aspek penting lainnya yang perlu ditelusuri pada Tabel 3 diatas adalah mengenai produksi per tenaga kerja. Nilai ini secara teori merefleksikan produktivitas tenaga kerja. Selama periode analisa, nilai produktivitas tenaga kerja pada sub sektor ini selalu mengalami perubahan, berkisar antara Rp 1.724.450 sampai Rp 2.386.680 dan rata-rata Rp 2.029.030. Nilai produktivitas yang berbeda dari tahun ke tahun, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut jelas ada kaitannya dengan variabel yang

mempengaruhi produktivitas itu sendiri. Oleh karena produktivitas tenaga kerja diperoleh dari nilai produksi per tenaga kerja, maka perubahan nilai produktivitas tersebut diduga dipengaruhi oleh harga produksi itu sendiri dan peningkatan produksi. Sedangkan peningkatan produksi ada kaitannya dengan Investasi. Namun berdasarkan data pada Tabel 2. dapat dikatakan bahwa produksi per tenaga kerja yang berfluktuasi selama periode analisa 'disebabkan oleh unit usaha, tenaga kerja dan investasi yang juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kecenderungannya adalah nilai investasi yang tinggi dan unit usaha yang banyak, diikuti oleh nilai produksi yang relatif tinggi. Disamping itu perubahan nilai produksi per tenagakerja juga ada kaitannya dengan perubahan harga produksi itu sendiri. Tapi data pada Tabel 2 dan 3 di atas belum dapat disimpulkan, apakah kenaikan produktivitas tenaga kerja itu lebih ditentukan oleh 'kenaikan kemampuan tenaga kerja dalam memproduksi atau lebih ditentukan oleh kenaikan harga. Penelitian lanjutan tentang hal ini sangat perlu dilakukan dalam melahirkan kebijaksanaan yang relatif tepat.

2. Keragaan Perkembangan Per cabang Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat.

Data yang disajikan pada Tabel 2 dan 3 di atas, menunjukkan keragaan sub sektor industri skala kecil secara keseluruhan. sedangkan sub sektor industri skala kecil terdiri atas 5 cabang. Oleh karena itu keragaan perkembangan

sub sektor ini perlu dikemukakan, seperti tersaji pada Tabel berikut ini.

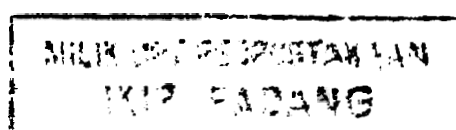
Tabel 4: Keragaan Perkembangan Sub Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988-1993

Cabang	UU	TK	I (000)	NP (000)
A. PANGAN	7.44%	-0.6%	-3.45%	-5.07%
B. SANLIT	3.78%	7.85%	24.10%	18.21%
C. KBB	1.10%	1.49%	5.24%	8.70%
D. KAUM	1.20%	1.37%	18.35%	24.46%
E. LOGAM	1.39%	1.67%	12.51%	11.22%

Sumber: Laporan tahunan Kanwil Perindustrian Sumatera Barat, 1993

Keterangan : UU = Unit Usaha
 TK = Tenaga Kerja,
 I = Investasi.
 NP = Nilai Produksi
 Sanlit = Sandang dan kulit
 KBB = Kimia dan bahan bangunan
 Kaum = Kerajinan dan umum

Data pada Tabel 4. secara umum memperlihatkan bahwa keragaan masing-masing cabang relatif berbeda, baik dalam unit usaha, penyerapan tenaga kerja, Investasi dan nilai produksi. Mengenai unit usaha seluruh cabang sub sektor ini mengalami perkembangan. Selama priode analisa, cabang industri pangan berkembang 7.4% per tahun, Sandang dan kulit 3.78% pertahun. Kimia dan bahan Bangunan 1.10% per tahun, kerajinan dan umum 1.70% per tahun dan Logam 1.39% per tahun. Diantara ke lima cabang industri tersebut ternyata cabang industri pangan memiliki perkembangan yang relattif besar.



Namun perkembangan unit usaha yang relatif besar tidak diikuti oleh perkembangan penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, malahan yang ditemukan kondisi yang paradoks. artinya selama periode analisa perkembangan penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi negatif masing-masingnya sebesar -0,6 %, -3,45% dan -5,07 % per tahun. Kondisi yang demikian mungkin disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi, artinya kapasitas produksi terpasang tidak terpakai secara keseluruhan. Terjadinya hal ini mungkin disebabkan oleh kelesuan pasar dari komoditi industri pangan dan banyak pesaing yang berasal industri skala menengah dan besar sehingga industri skala kecil kurang mampu menghadapinya. Semua dugaan ini memerlukan studi khusus dalam rangka memperoleh informasi yang jelas tentang hal ini.

Cabang industri lain adalah industri sandang dan kulit, Kimia dan bahan bangunan, kerajinan umum dan logam. Semua cabang industri ini menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. baik dalam hal unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi.

Perkembangan dalam unit usaha dapat memberikan indikasi bahwa cabang sub sektor ini tergolong relatif mudah diusahakan oleh masyarakat, karena bahan bakunya tersedia dalam jumlah yang cukup dan produksi dari industri tersebut dibutuhkan oleh konsumen lokal. Semua cabang sub sektor ini menunjukkan perkembangan unit usaha selama periode analisa masing-masingnya sandang dan kulit 3,78%, Kimia dan bahan

bangunan 1,10%, kerajinan umum 1,20% dan logam 1,39%.

Perkembangan unit usaha ini, selalu diikuti oleh perkembangan penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi. Hal ini terjadi pada cabang industri sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, kerajinan umum dan logam. Pada industri sandang dan kulit terjadi perkembangan pada masing-masing variabel tersebut sebesar 7,85%, 24,10% dan 18,21%. Pada industri kimia dan Bahan Bangunan sebesar 1,49%, 5,24% dan 8,70%. Industri kerajinan umum sebesar 1,37%, 18,35% dan 24,46%, industri logam sebesar 1,67%, 11,31% dan 12,23%.

Perkembangan dalam investasi dan nilai produksi pada empat industri yang disebutkan terakhir, menunjukkan nilai perkembangan yang relatif besar, kecuali cabang industri kimia dan bahan bangunan. Data ini dapat memberikan indikasi kepada kita bahwa ke empat cabang industri tersebut relatif cocok dikembangkan di Sumatera Barat karena mungkin sesuai dengan potensi alamiah Sumatera Barat. Kemungkinan lain adalah pemasaran dari produk yang dihasilkan relatif luas. Dugaan ini dikemukakan karena secara teori perkembangan investasi dan produksi suatu sektor ekonomi sangat erat kaitannya dengan segmen pasar dan harga pasar yang relatif luas dan menguntungkan. Kondisi ini pada gilirannya merangsang produsen untuk meningkatkan produksi. Implikasi kebijaksanaannya adalah perlu diupayakan perluasan daerah pemasaran komoditi industri skala kecil dengan tingkat harga yang

menguntungkan. Kebijaksanaan kongrit untuk itu dapat berupa promosi produk unggulan industri tersebut baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Kebijakan yang lain adalah memberikan perlindungan kepada industri skala kecil dengan membatasi industri skala besar untuk menghasilkan komoditi yang sama dengan komoditi yang dihasilkan industri skala kecil.

Semua kebijaksanaan di atas sangat perlu di upayakan, mengingat industri skala kecil sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap penyerapan Angkatan Kerja, walaupun dalam hal pembentukan pendapatan wilayah kontribusinya masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan terjadinya kepincangan dalam industri skala kecil tersebut, artinya kemampuan dalam pembentukan pendapatan wilayah masih relatif rendah. Rekomodasi ini di arahkan kepada Kanwil dan Kandep Perindustrian pada daerah tingkat I dan II, untuk dapat meningkatkan produktivitas sub sektor ini pada masa mendatang, sehingga dapat diwujudkan suatu struktur ekonomi yang mempunyai basis yang kuat di tengah-tengah masyarakat (Broad Base Teknologi). Pada gilirannya hal ini akan melahirkan pemeretaan dalam proses pembangunan.

Keragaan lain yang perlu dikemukakan adalah kemampuan masing-masing cabang sub sektor industri skala kecil dalam menyerap tenaga kerja, investasi dan nilai produksi per unit usaha, investasi dan nilai produksi per tenaga kerja. Informasi ini disajikan pada Tabel 5 berikut:

Berdasarkan Tabel 5 , ditemukan bahwa kemampuan masing-masing cabang sub sektor industri skala kecil bervariasi. Industri pangan 2 orang per unit usaha, sandang dan kulit 3

Tabel 5: Keragaan Industri Skala Kecil Dalam Hal TK/UU, I/UU, NP/UU, dan NP/TK di Sumatera Barat, 1988-1992.

Cabang	TK/UU	I/UU(000)	NP/UU(000)	I/TK(000)	NP/TK(000)
A.FANGAN	2	675,51	7.610,84	245,44	2.773,60
B.SANLIT	3	957,76	8.722,24	239,93	2.193,96
C. KBB	2	1073,31	6.577,87	377,41	2.309,29
D.KAUM	1	177,50	3.239,20	132,11	1.655,30
E.LOGAM	2	112,77	5.242,60	399,06	1.879,00

Sumber: Laporan Tahunan Kanwil Ferindustrian Sumatera Barat, 1993

Keterangan: TK/UU = Tenaga kerja per unit usaha
 I/UU = Investasi per unit usaha
 NP/UU = Nilai produksi per unit usaha
 I/TK = Investasi per tenaga kerja
 NP/TK = Nilai produksi per tenaga kerja

orang per unit usaha, kimia dan bahan bangunan 2 orang per unit usaha, kerajinan umum 1 orang per unit usaha dan logam 2 orang per unit usaha. Dari kelima cabang ini, industri sandang dan kulit relatif tinggi kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Data ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa cabang industri sandang dan kulit relatif padat karya, artinya dalam memproduksi cabang industri tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja. Dugaan ini di dasarkan atas kenyataan memang cabang industri sandang dan kulit melakukan produksi dengan teknik produksi yang relatif tradisional dan re-

latif sedikit memakai teknik produksi yang relatif moderen.

Dari segi investasi, ternyata kelima cabang industri nilai investasi yang dibutuhkan per unit usaha juga bervariasi. Diantara cabang industri yang ada, cabang industri logam membutuhkan dana investasi yang relatif besar yaitu Rp. 1.112.770 selama periode analisa. Namun kalau dilihat kemampuan berproduksi per unit usaha ternyata cabang industri logam bukan termasuk industri yang tertinggi dalam menghasilkan produksi per unit usaha. Dalam hal ini yang tertinggi adalah cabang industri sandang dan kulit yaitu rata-rata Rp. 8.722.240 per unit usaha selama periode analisa. Data ini dapat memberikan indikasi bahwa produktivitas cabang industri sandang dan kulit relatif tinggi sedangkan dana investasi yang dibutuhkan bagi cabang industri ini relatif rendah, hanya sebesar Rp. 957.760 per unit usaha. Relatif tingginya nilai produksi cabang industri sandang dan kulit per unit usaha, mungkin disebabkan oleh tingginya harga produk yang dihasilkan karena jumlah unit usaha cabang industri ini terlihatannya relatif rendah (perhatikan Tabel 4). Implikasinya, pada masa datang cabang ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan, mengingat investasi bagi pengembangannya relatif rendah, namun dapat menghasilkan nilai produksi yang relatif tinggi. Pada gilirannya hal ini dapat memberikan kontribusi yang juga relatif tinggi terhadap pembentukan nilai tambah sub sektor industri skala kecil secara keseluruhan.

Cabang industri lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya adalah cabang industri pangan. Cabang industri ini dana investasi yang diperlukan hanya sebesar Rp 675.510.- per unit usaha selama periode analisa. Nilai ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan cabang industri kimia dan bahan bangunan, kerajinan dan umum. Sedangkan nilai produksi cabang industri pangan jauh lebih tinggi dari kedua cabang industri tersebut yaitu sebesar Rp 2.733. 600,- per tahun selama periode analisa. Cabang industri kimia dan bahan bangunan dari segi nilai produksi per unit usaha juga termasuk relatif tinggi, yaitu sebesar Rp 6. 577. 870.- per tahun selama periode analisa. Nilai produksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan cabang industri logam. Sedangkan nilai investasi industri logam lebih tinggi dari industri kimia dan bahan bangunan. Oleh karena itu cabang ini dapat dikatakan cukup prospektif dikembangkan untuk masa yang akan datang. Industri kerajinan dan umum merupakan cabang industri yang paling rendah dana investasinya, hanya sebesar Rp 177.500.- per unit usaha selama periode analisa, namun cabang industri ini nilai produksi yang dihasilkan per tahun yang relatif besar yaitu Rp 2.477.560 per unit usaha dan nilai produksi per tenaga kerja sebesar Rp 1.280.390 selama periode analisa. Barangkali hal ini yang menyebabkan cabang industri ini relatif banyak jumlahnya dengan nilai perkembangan investasi dan nilai produksi yang relatif tinggi (Perhatikan Tabel 4)

R. Analisis Dampak Wilayah

Untuk melihat dampak wilayah yang ditimbulkan oleh industri skala kecil terhadap pembangunan Sumatera Barat, digunakan Economic Base Model. Melalui model ini dapat diketahui keberadaan industri skala kecil dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah.

1. Analisa Sektor Basis

Melalui analisa ini dapat diketahui keberadaan industri skala kecil dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat. Keberadaan yang dimaksud adalah basis tidaknya sub sektor industri skala kecil dalam struktur perekonomian Sumatera Barat. Untuk keperluan ini dipakai Indeks Kuosien Lokasi (LQ). Hasil perhitungan indeks LQ tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Berdasarkan Tabel 6. ditemukan bahwa nilai indeks LQ bervariasi dari tahun ke tahun, namun secara rata-rata sub sektor ini memiliki indeks LQ sebesar 1.21 selama periode analisa. Berdasarkan konsep Economic Base, berarti sub sektor industri skala kecil keberadaannya termasuk sektor basis dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat. Angka temuan ini dapat ditafsirkan bahwa industri skala kecil merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi pembangunan yang cukup berarti dalam struktur perekonomian wilayah Sumatera Barat. Pernyataan ini bertitik tolak dari nilai indeks LQ industri skala kecil yang lebih besar dari satu. Secara teori

Tabel 6. Nilai Indeks LQ Industri Skala Kecil di Sumatera Barat. 1988-1992.

Tahun	1	2	3	4	5
1988	162.647,75	8.262,906	1.596.839,52	94.080,50	1.16
1989	185.811,57	8.960.530	1.712.063,05	99.981,40	1.21
1990	195.294,30	9.296.634	1.832.399,46	107.436,60	1.23
1991	197.731,56	9.808.064	1.946.122,00	115.110,10	1.19
1992	243.481,42	11.249.209	2.076.38	122.705,00	1.27

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 1994

Keterangan: 1= Nilai tambah sub sektor ISK Sumbar (Rp Jutaan)
 2= Nilai tambah sub sektor ISK Indonesia (Rp
 Jutaan)
 3= Pendapatan wilayah Sumbar (Rp Jutaan)
 4= Pendapatan wilayah Indonesia (Rp Miliaran)
 5= Indeks LQ

angka ini mengandung pengertian bahwa produk yang dihasilkan oleh sub sektor industri skala kecil, disamping mampu memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera Barat juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di luar wilayah (Ekspor ke daerah lain). Nilai ekspor ke luar wilayah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh industri skala kecil, pendapatan ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan permintaan masyarakat terhadap produk lain yang di butuhkan di wilayah tersebut. Permintaan masyarakat yang semakin meningkat akan dapat memacu pertumbuhan produksi sekaligus pertumbuhan investasi, ceteris paribus. Mekanisme ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan nilai peubah yang menentukan nilai indeks IQ industri skala kecil pada Tabel 6 di atas, dapat ditentukan nilai surplus yang dihasilkan baik secara relatif maupun secara absolut. Hasil perhitungan kedua surplus tersebut disajikan padaa Tabel berikut:

Tabel 7 . Indeks Suplus Relatif dan Absolut Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1888 - 1992

Wilayah	Nilai Tambah Industri Skala Kecil	Pendapatan Wilayah	Pangsa Relatif (%)	IRS (%)	ISA (Rp Jutaan)
1. Sumbar (Rp Jutaan)	196.993,32	1.832.762,41	10,74	1,92	35.189,82
2. Indonesia (Rp Miliar)	9.515,46	107.862,72	8,82		

sumber ; pata diolah dari hasil penelitian, 1994

keterangan : ISR = Indeks surplus relatif

ISA = Indeks surplus absolut

Perhitungan pada Tabel 7. memperlihatkan kontribusi industri skala kecil terhadap pendapatan wilayah Sumatera Barat sebesar 10.74% selama periode analisa. Angka ini relatif lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama terhadap pendapatan nasional Indonesia yaitu sebesar 8.82% pada periode yang sama. Berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh sektor industri skala kecil terhadap perekonomian Sumatera Barat, dapat dihitung indeks surplus relatif yang dihasilkan sektor ini yaitu sebesar 1.92%. Secara teori

angka ini meberikan indikasi bahwa sektor industri skala kecil memiliki indkes spesialisasi lokal yang lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Secara absolut. industri skala kecil di Sumatera Barat menghasilkan surplus sebesar Rp 35.189,82 juta selama priode analisa.

Temuan di atas memberikan indikasi bahwa. sub sektor industri skala kecil keberadaan dan peranannya sangat berarti sekali dalam proses pembangunan wilayah Sumatera Barat. Implikasi penemuan ini adalah dalam perencanaan pembangunan wilayah Sumatera Barat. sub sektor ini harus di prioritaskan pengembangannya.

Dengan berkembangnya sub sektor ini dapat merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Kebijakan konkrit yang dapat dilakukan untuk keperluan ini adalah. membentuk suatu institusi yang dapat di jadikan sebagai wadah bagi pengrajin sehingga dapat meningkatkan adu tawar mereka dalam rangka pengembangan usahanya. Kopinkra sebagai salah satu bentuk institusi yang terkait dengan hal ini. melalui berbagai macam perbaikan masih dapat diharapkan perannya. Artinya memfungsikan kembali kopinkra tersebut . walaupun masih banyak individu-individu di tenegah masyarakat yang kurang percaya terhadap kemampuan institusi tersebut. Dengan demikian upaya pemerintah untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat merupakan bahaagian dari kebijaksanaan ini.

2. Analisa Dampak Pendapatan dan Kesempatan Kerja

Analisa di atas hanya memperlihatkan keberadaan industri skala kecil dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat. Ditemukan bahwa sub sektor tersebut tergolong sebagai sektor basis, namun belum terlihat berapa besar dampak yang ditimbulkan oleh pengembangan industri skala kecil terhadap pendapatan dan kesempatan kerja wilayah Sumatera Barat. Analisa ini akan disajikan pada bagian berikut melalui konsep Economic Base Multiplier.

Berdasarkan Tabel 8 ditemukan bahwa koefisien multiplier pendapatan jangka pendek industri skala kecil di Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun 1988 sampai 1992. Berfluktuasinya nilai koefisien tersebut secara langsung jelas disebabkan oleh pendapatan industri skala kecil dan total

Tabel 8: Multiplier Pendapatan Jangka Pendek Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988-1992.

Tahun	1	2	3	4
1988	1.596.859,21	162.647,75	1.432.211,46	9.69
1989	1.712.063,05	185.811,57	1.526.251,52	9.21
1990	1.832.399,46	195.794,30	1.637.105,16	9.38
1991	1.946.122,00	197.731,56	1.748.390,44	9.84
1992	2.076.380,00	243.481,42	1.832.898,58	8,53

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 1994

Keterangan : 1 = Pendapatan wilayah Sumatera Barat
(Rp Jutaan)

2 = Pendapatan sektor basis (Rp Jutaan)

3 = Pendapatan sektor non basis (Rp Jutaan)

4 = Multiplier pendapatan jangka pendek

pendapatan wilayah Sumatera Barat yang juga berfluktuasi selama periode analisa.

Selama periode analisa jika di rata-ratakan, diperoleh nilai koefisien multiplier pendapatan jangka pendek sebesar 9.33. Bertitik tolak dari konsep **Economic Base Multiplier**, angka di atas dapat ditafsirkan bahwa setiap terjadi perubahan pendapatan sektor basis (industri skala kecil) sebesar Rp. 1, melalui proses multiplier, pendapatan wilayah akan berubah sebesar Rp 9,33. Penemuan ini juga memberikan indikasi bahwa sub sektor industri skala kecil peranannya relatif besar terhadap perekonomian wilayah Sumatera Barat. secara relatif peranan sub sektor ini selama priode yang sama terhadap pembentukan pendapatan wilayah Sumatera Barat 10,74% rata-rata pertahun, angka ini relatif lebih besar dari sub sektor industri skala besar dan sedang.

Analisa lain yang perlu dikemukakan adalah dampak multiplier pendapatan jangka panjang dari sub sektor industri skala kecil terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat. Hasil perhitungan koefisien ini disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9 memperlihatkan bahwa multiplier pendapatan jangka panjang industri skala kecil di Sumatera Barat nilainya berkisar antara 10,91 samapai 12,56 dan rata-rata sebesar 11.36. Secara teori angka tersebut dapat ditafsirkan bahwa setiap terjadi perubahan pendapatan sektor basis(industri skala kecil) sebesar Rp 1.-. mengakibatkan terjadinya perubahan pendapatan wilayah Sumatera Barat Rp 10,91 sampai

Tabel 9. Multiplier Pendapatan Jangka Panjang Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1888 - 1992

Tahun	Y Rp Jutaan	YB Rp Jutaan	YN Rp Jutaan	MI Rp Jutaan	YI Rp Jutaan	CL Rp Jutaan	M L
1988	1.566.859,21	162.647,75	1.432.211,46	107.933,77	127.676,77	872.393,07	11 . 02
1989	1.712.063,05	185.811,57	1.525.251,52	116.326,92	129.352,24	914.466,39	10 . 91
1990	1.832.199,46	195.794,30	1.637.105,16	112.621,17	135.038,42	966.623,84	10 . 60
1991	1.946.122,00	197.731,56	1.748.390,44	132.705,12	175.487,51	1.027.314,86	12 . 36
1992	2.076.380,00	243.481,42	1.832.898,58	124.170,15	201.756,33	1.099.005,78	12 . 53
							11 . 36

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, 1994

Keterangan : Y = Pendapatan Wilayah Sumatera Barat
 YB = Pendapatan Sektor Basis
 YN = Pendapatan Sektor Non Basis
 MI = Pengeluaran Lokal Untuk Barang Inpor
 YI = Investasi Wilayah Sumatera Barat
 CL = Konsumsi lokal Terhadap Barang dan Jasa

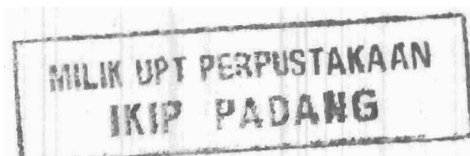
Rp 12.56 dan secara rata-rata Rp 11.36 selama periode analisa.

Bila diperhatikan data pada Tabel 8 dan Tabel 9, ternyata nilai koefisien multiplier pendapatan jangka panjang relatif lebih besar dari koefisien multiplier pendapatan jangka pendek. Relatif lebih besarnya nilai koefisien multiplier pendapatan jangka panjang karena dalam model analisa jangka panjang telah dimasukan peubah investasi. Dengan demikian peningkatan pendapatan wilayah yang disebabkan oleh perubahan pendapatan sektor basis terjadi melalui proses reinvestasi. Temuan ini memberikan indikasi bahwa peubah investasi merupakan salah satu faktor penentu utama dalam proses pembangunan wilayah. Oleh karena itu kebijaksanaan yang tepat dalam mengendalikan peubah investasi tersebut sangat perlu diupaya-

kan. Artinya sangat perlu diciptakan suatu iklim yang kondusif. sehingga para investor baik domestik maupun investor luar negeri tertarik untuk melakukan investasi di wilayah Sumatera Barat. Berkaitan dengan hasil temuan ini, kebijaksanaan debiroktisasi dan deregulasi perlu dilanjutkan dan disempurnakan. terutama sekali yang berkaitan dengan upaya peningkatan investasi.

Kebijaksanaan konkrit untuk meningkatkan investasi sangat perlu dilakukan, mengingat investasi wilayah seperti tertera pada Tabel 8 dapat dikatakan masih relatif rendah. Seiring dengan itu, pengeluaran lokal untuk membayar harga barang impor tidak jauh berbeda nilainya dengan investasi wilayah. Peubah impor secara teori merupakan unsur kebocoran dalam perekonomian wilayah. Hal inilah barangkali yang menyebabkan relatif kecilnya perbedaan nilai koefisien multiplier jangka panjang dengan multiplier jangka pendek. Temuan ini memperkuat alasan untuk perlunya diupayakan kebijaksanaan untuk meningkatkan investasi wilayah dan kebijaksanaan penekanan impor wilayah. Implikasinya adalah pada masa datang pengembangan sektor ekonomi pada umumnya dan sub sektor industri skala kecil pada khususnya harus diprioritaskan pada sektor ekonomi yang konten lokal dari inputnya relatif besar. sehingga nilai tambah bersih yang dihasilkan oleh sektor ekonomi tersebut menjadi relatif tinggi.

Dampak lain dari pengembangan sub sektor industri skala kecil adalah kemampuan sub sektor ini mengabsorbsi angkatan



kerja wilayah. Dampak ini diukur dengan multiplier tenaga kerja dari sektor basis yang bersangkutan. Perhitungannya adalah dengan membagi total tenaga kerja wilayah Sumatera Barat dengan total tenaga kerja di Sub sektor industri skala kecil. Hasil perhitungan ini disajikan pada Tabel berikut.

Perhitungan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa selama periode analisa nilai koefisien multiplier tenaga kerja bervariasi dari tahun ke tahun, namun dapat dikatakan relatif stabil yang berkisar antara 14,48 sampai 15,07 dan rata-rata 14,76 pertahun. Angka ini dapat ditafsirkan bahwa setiap terja di peningkatan kesempatan kerja di sub sektor industri skala kecil sebanyak 1 orang, mengakibatkan meningkatnya kesempatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 14,76 orang, ceteris paribus.

Tabel 10: Multiplier Tenaga Kerja Sub Sektor Industri Skala Kecil di Sumatera Barat, 1988-1992.

Tahun	LB	LW	MT
1988	94.395	1.300.400	14.72
1989	96.939	1.461.400	15.07
1990	101.537	1.497.000	14.74
1991	103.684	1.501.900	14.48
1992	105.488	1.536.700	14.82

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 1994.

Keterangan: LB = jumlah tenaga kerja sektor basis (orang)

LW = jumlah tenaga kerja di Sumatera Barat.
(orang)

MT = multiplier tenaga kerja.

Berdasarkan konsep Economic Base Multiplier, proses perubahan kesempatan kerja di atas terjadi karena sub sektor industri skala kecil di Sumatera Barat mampu mengekspor ke luar wilayah disamping dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya. Hasil ekspor itu akan mengalir lagi ke dalam wilayah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dalam proses selanjutnya akan meningkatkan permintaan dan investasi dalam perekonomian wilayah. Peningkatan investasi secara langsung akan dapat memperluas kesempatan kerja wilayah yang bersangkutan. Penemuan ini memperkuat rekomendasi sebelumnya bahwa industri skala kecil sangat perlu diupayakan oleh pemerintah, karena sub sektor ini, disamping memiliki saham dalam pembentukan pendapatan wilayah juga memiliki saham yang relatif besar dalam memperluas kesempatan kerja wilayah. Artinya industri skala kecil merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diandalkan perannya dalam menyerap angkatan kerja wilayah di samping perannya dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

3. Analisa Pertumbuhan Pendapatan dan Kesempatan Kerja

Berdasarkan nilai koefisien multiplier pendapatan dan tenaga kerja pada Tabel 8 dan 10, dapat ditentukan nilai pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja wilayah Sumatera Barat. Pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja ini ditentukan dengan jalan mengalikan nilai koefisien multiplier pendapatan jangka pendek dan jangka panjang dengan perubahan pendapatan wilayah, sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja

wilayah diperoleh dengan mengalikan perubahan kesempatan kerja wilayah dengan multiplier tenaga kerja. Hasil perhitungan kedua pertumbuhan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Hasil perhitungan pada Tabel 11, memperlihatkan bahwa dampak pendapatan sektor basis terhadap total pendapatan wilayah Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berfluktuasinya perubahan pendapatan wilayah tersebut lebih ditentukan oleh perubahan pendapatan yang terjadi pada sektor basis, karena multiplier pendapatan selama periode analisa dapat dikatakan relatif stabil. Penemuan ini dapat memberikan indikasi bahwa perubahan pendapatan pada wilayah tertentu sangat ditentukan oleh perubahan pendapatan yang terjadi pada sektor basis. Atas dasar ini barangkali Glasson (1974) mengemukakan bahwa sektor basis berperan sebagai penggerak utama

Tabel 11. Pertumbuhan Pendapatan Jangka Pendek Wilayah Sumatera Barat .1988- 1992

Tahun	MS	dYB (Rp Jutaan)	d YSR (jutaan)
1988	9.69	0	0
1989	9.21	23.163.82	213.338.78
1990	9.38	9.482.37	88.948.01
1991	9.84	2.437.26	23.982
1992	8,53	45.749,86	390.246,30

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian tahun 1994.

Keterangan: MS = multiplier pendapatan jangka pendek
 dYB = Perubahan pendapatan sektor basis
 dYSR= Dampak pendapatan sektor basis terhadap pendapatan wilayah Sumatera Barat.

dalam proses pembangunan wilayah. Oleh karena itu sektor basis tersebut harus diprioritaskan pengembangannya pada setiap wilayah. Dengan prioritas ini, berarti kita telah mengembangkan sektor ekonomi sesuai dengan potensi wilayah. Pada gilirannya hal ini, akan dapat melahirkan efisiensi dan optimalisasi dalam pemanfaatan sumberdaya.

Implikasi lain dari penemuan ini adalah bahwa dalam rangka mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dalam pembangunan suatu wilayah, harus bertitik tolak dari sektor ekonomi yang tergolong sebagai sektor basis dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mempunyai data dan informasi tentang hal ini. Dengan data dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai input yang sangat positif dalam merancang kebijaksanaan daerah.

Tabel 12. Pertumbuhan Pendapatan Jangka Panjang Sumatera Barat .1988- 1992

Tahun	ML	dYB (Rp Jutaan)	d YLR (Jutaan)
1988	11.02	0	0
1989	10.91	23.163.82	252.717,28
1990	10.60	9.482.37	100.513,12
1991	12.56	2.437,26	30.611,99
1992	12.53	45.749,86	573.245,76

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian tahun 1994.

Keterangan: ML = multiplier pendapatan jangka panjang

dYB = Perubahan pendapatan sektor basis

dYLR= Dampak pendapatan jangka panjang sektor terhadap pendapatan Sumatera Barat.

Analisa di atas belum memasukan peubah inestasi dan pengeluaran lokal terhadap barang impor. Bila kedua peubah ini dimasukan kedalam model analisa, maka analisa tersebut dinamakan analisa pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Perhitungan dari analisa ini disajikan pada Tabel di atas.

Hasil perhitungan Tabel 12 memperlihatkan bahwa dampak perubahan pendapatan sektor basis terhadap pertumbuhan pendapatan Sumatra Barat dalam jangka panjang relatif lebih besar dari pertumbuhan pendapatan jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh relatif lebih besarnya nilai koefisien multiplier jangka peanjang dibandingkan dengan koefisien multiplier pendapatan jangka pendek. Analisa ini memeperkuat kesimpulan tentang relatif pentingnya peranan peubah investasi dalam proses pembangunan suatu wilayah.

Data yang disajikan pada Tabel 11 dan 12 baru memperlihatkan pertumbuhan pendapatan yang disebabkan perubahan pendapatan sektor basis. Analisa lain yang relatif penting adalah pertumbuhan kesempatan kerja wilayah yang disebabkan oleh pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor basis. Informasi ini disajikan pada Tabel 13.

Hasil perhitungan koefisien multiplier tenaga kerja pada Tabel 13. memperlihatkan bahwa perubahan kesempatan kerja wilayah juga berfluktuasi selama periode analisa.

Fluktuasi tersebut kelihatannya lebih ditentukan ole perubahan kerja kesempatan kerja yang terjadi pada sektor basis. karena multiplier tenaga kerja dapat dikatakan relatif

Tabel 13: Pertumbuhan Kesempatan Kerja Wilayah Tahun 1988 - 1992 di Sumatera Barat.

Tahun	M.T	L B	dLB	dLW
1988	14.72	94.355	0	0
1989	15.67	96.939	2.584	38.036
1990	14.74	101.537	4.598	67.774,52
1991	14.48	103.604	2.067	29.930,16
1992	14.82	105.488	1.804	26.735

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 1994

Keterangan: MT = Multiplier tenaga kerja

LB = Jumlah tenaga kerja di sektor basis (orang)

dLB = perubahan jumlah tenaga kerja sektor basis (orang)

dLW = perubahan kesempatan kerja wilayah (orang)

stabil. Angka ini memperkuat kesimpulan bahwa sektor basis merupakan motor penggerak utama dalam pembangunan wilayah. baik dalam memacu pertumbuhan pendapatan maupun kesempatan kerja wilayah.

Dilihat dari segi pengalokasian dana pembangunan sektoral. Penemuan ini memberikan implikasi bahwa sektor ekonomi yang berperan sebagai sektor basis, jumlah dana yang dialokasikan pada sektor tersebut harus relatif lebih besar, karena pertumbuhan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Hal ini sangat perlu diupayakan, mengingat industri skala kecil diusahakan oleh sebahagian besar golongan masyarakat di daerah pedesaan dan daerah pinggiran kota. Apabila sub sektor ini berkembang, sebahagian besar golongan masyarakat pendapatannya meningkat. Atas dasar inilah barangkali Raharjo (1986) mengatakan bahwa

pengembangan sub sektor industri skala kecil dapat dijadikan sebagai instrumen dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata disamping untuk menciptakan basis ekonomi yang relatif kuat.

C. Keberadaan Industri Skala Kecil Pada Setiap Daerah Tingkat II di Sumatera Barat

Data yang disajikan pada Tabel 6, menunjukkan bahwa industri skala kecil di Sumatera Barat merupakan sektor basis dalam struktur perekonomian wilayah. Hal ini bukan berarti bahwa sub sektor ini juga merupakan sektor basis pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat, karena setiap daerah memiliki spesifik wilayah tersendiri. Agar kebijaksanaan pengembangan sub sektor ini relatif tepat maka sangat perlu diketahui, daerah-daerah tingkat II yang potensial bagi pengembangan industri skala kecil. Informasi tentang hal ini disajikan pada Tabel berikut.

Berdasarkan Tabel 14 ditemukan bahwa setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat keberadaan sub sektor industri skala kecil relatif berbeda. Hal ini mengindikasikan relatif berbedanya potensi masing-masing daerah bagi pengembangan sub sektor industri skala kecil.

Dari 14 daerah tingkat II di Sumatera Barat, sebanyak 11 daerah tingkat II sub sektor industri skala kecil tergolong sektor basis, karena nilai indeks koefisien lokasinya lebih besar dari satu. Ini memperlihatkan bahwa ke 11 daerah

Tabel 14: Indeks LQ Industri Skala Kecil Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat, 1988-1992

Kab/Wilayah	1988	1989	1990	1991	1992	LQR
A. Kabupaten						
1. Pesisir Selatan	0,66	0,69	0,71	0,70	0,57	0,66
2. Solok	0,62	0,75	0,71	0,65	0,62	0,67
3. Sawahlunto Sjj	0,51	0,45	0,47	0,26	0,25	0,38
4. Tanah Datar	1,61	1,62	1,17	1,48	1,60	1,50
5. Padang Pariaman	3,73	4,36	2,52	1,90	2,05	2,91
6. Agam	2,32	2,45	3,58	3,06	4,95	3,19
7. 50 Kota	8,90	9,58	6,55	3,25	3,46	6,34
8. Pasaman	1,08	0,97	0,96	1,06	1,06	1,02
B. Kodya						
1. Padang	1,22	1,36	1,94	1,77	2,03	1,56
2. Solok	3,73	2,35	4,07	4,35	3,75	3,65
3. Sawahlunto	1,45	1,28	1,29	2,02	1,49	1,50
4. Padang Panjang	1,42	1,61	1,84	1,63	1,71	1,64
5. Bukittinggi	3,25	4,20	5,19	5,81	6,03	4,90
6. Payakumbuh	7,10	7,09	7,05	3,60	3,47	5,66

Sumber: Diolah Dari Hasil Penelitian 1994

Keterangan : LQR = Indeks LQ Rata-Rata

tingkat II tersebut, kontribusi industri skala kecil di dalam total pendapatan wilayah di daerah tersebut lebih besar dari pada kontribusi industri skala kecil secara total di Sumatera Barat dalam pembentukan pendapatan wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian sub sektor industri skala kecil mempunyai potensi pembangunan yang cukup berarti dan layak untuk diprioritaskan pengembangan pada masing-masing daerah tingkat II yaitu Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, 50 Kota, Pasaman, Padang, Sawahlunto, Solok, Padang panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh.

Bila dibandingkan keberadaan industri skala kecil per daerah tingkat II, maka Kabupaten 50 Kota, Agam, Kodya

Eukittinggi dan Pavakumbuh memiliki indeks LQ yang relatif besar yaitu masing-masing 6.34, 3.19, 4.90 dan 5.66. Berarti ke empat daerah tingkat II ini, sub sektor tersebut keberadaan dan perannya dalam proses pembangunan wilayah relatif besar dibandingkan dari daerah lainnya. Hasil temuan ini sesuai dengan kondisi yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata ke empat daerah ini menghasilkan beberapa komoditi unggulan yang segmen pasarnya relatif luas seperti: songket, anyaman rotan, bordir, gula merah, galamai, dan kerupuk sanjai.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa BAPPEDA masing-masing wilayah tersebut harus memberikan perhatian dan mengkaji secara lebih detail sub sektor ini, sehingga dapat melahirkan kebijaksanaan yang kongrit bagi pengembangannya. Sehubungan dengan hal ini perlu informasi tentang keberadaan masing-masing cabang sub sektor industri skala kecil, karena belum tentu seluruh cabang industri skala kecil pada suatu daerah tergolong sektor basis, walaupun secara keseluruhan tergolong sektor basis. Dengan adanya informasi ini, setiap daerah diharapkan dapat berspesialisasi dalam menghasilkan produk produk yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Tabel berikut ini menyajikan keberadaan masing-masing cabang sub sektor industri skala kecil per daerah tingkat II di Sumatera Barat.

Tabel 14 menunjukkan bahwa pada kabupaten Pesisir Selatan, Solok dan Sawahlunto Sijunjung, seluruh cabang industri skala kecil tidak tergolong sebagai sektor basis.

Hasil ini relevan dengan penemuan pada Tabel 13. Pada Tabel tersebut ke tiga daerah itu, industri skala kecilnya secara keseluruhan juga tidak tergolong sebagai sektor basis. Implikasi penemuan ini adalah ketiga daerah ini harus melakukan spesialisasi dalam menghasilkan produk yang bukan berasal dari sub sektor industri skala kecil tapi pada sektor-sektor yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah.

Informasi lain yang dapat dibaca dari tabel 15 di atas adalah bahwa daerah-daerah yang industri skala kecilnya tergolong sektor basis (Tabel 14), ternyata tidak seluruh Tabel 15. Rata-Rata Nilai Indeks LQ Cabang Sub Sektor Industri Skala Kecil Per Daerah Tingkat II di Sumatera Barat, 1988-1992.

Kab/Wilayah	I	II	III	IV	V
A. Kabupaten					
1. Pesisir Selatan	0.17	0.40	0.52	0.13	0.47
2. Solok	0.30	0.20	0.43	0.31	0.51
3. Sawahlunto Sjj	0.14	0.09	0.22	0.13	0.28
4. Tanah Datar	1.18	0.49	0.38	0.60	0.55
5. Padang Pariaman	0.83	1.71	0.72	0.60	1.42
6. Agam	1.00	2.99	1.64	1.10	1.40
7. SO Kota	3.08	0.93	2.09	2.93	0.68
8. Pasaman	1.54	0.06	1.80	0.36	0.66
B. Kota					
1. Padang	0.77	0.51	1.06	1.50	1.02
2. Solok	1.86	0.68	2.87	1.30	1.03
3. Sawahlunto	1.02	0.63	0.30	0.69	2.02
4. Padang Panjang	0.58	0.72	0.51	0.43	1.02
5. Bukittinggi	1.74	7.41	3.15	0.71	2.12
6. Payakumbuh	3.81	0.96	1.34	1.93	1.03

Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 1994

Ket: 1. = Industri Pangan
 2. = Industri Sandang dan kulit
 3. = Industri Kimia dan bahan bangun
 4. = Industri Kerajinan Umum
 5. = Industri Logam

cabang sub sektor ini tergolong sektor basis pada masing-masing daerah tersebut.

Penemuan ini memberikan implikasi bahwa setiap daerah harus memprioritaskan pengembangan cabang-cabang industri skala kecil yang tergolong sebagai sektor basis. Dengan demikian, daerah tersebut dapat meningkatkan efisien produksi sehingga daya saing produk yang dihasilkan relatif tinggi. Pada gilirannya hal ini akan dapat meningkatkan pangsa-pasar. Dalam proses selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya perluasan produksi. Pada Tabel berikut disajikan daerah-daerah yang cabang industri skala kecilnya tergolong sebagai sektor basis (Tabel 16).

Tabel 16: Rekapitulasi Cabang Industri Skala Kecil Yang Tergolong Sektor Basis Per Daerah Tingkat II di-Sumatera Barat, 1988 - 1992

Kab/Wilayah	I	II	III	IV	V
A. Kabupaten					
1. Tanah Datar	v	-	-	-	-
2. Padang Pariaman	v	-	-	-	v
3. Agam	v	v	v	v	v
4. SO Kota	v	-	v	v	v
5. Pasaman	v	-	-	-	-
B. Kodva					
1. Padang	-	-	v	v	v
2. Solok	v	-	v	v	v
3. Sawahlunto	v	-	-	-	-
4. Padang Panjang	-	-	-	-	v
5. Bukittinggi	v	v	v	-	v
6. Payakumbuh	v	-	v	v	v

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian, 1994

Keterangan : I = Industri pangan

II = Industri sandang dan kulit

III = Industri kimia dan bahan bangunan

IV = Industri kerajinan dan umum

V = Industri logam

Tabel 16 memperlihatkan keragaan masing-masing daerah dalam hal nilai indeks kuosien lokasi yang dimilikinya relatif berbeda. Kabupaten Tanah Datar hanya potensial bagi pengembangan industri pangan, oleh karena itu daerah ini harus memprioritaskan pengembangan industri tersebut, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman harus memprioritaskan pengembangan industri sandang dan kulit dan industri logam.

Kabupaten Agam merupakan daerah, dimana seluruh cabang industri kecilnya tergolong sektor basis. Artinya daerah ini mempunyai potensi yang relatif besar bagi pengembangan seluruh cabang industri tersebut. Kabupaten 50 Kota, Kodya Payakumbuh, Bukittinggi dan Sawahlunto adalah daerah daerah tingkat II lainnya, dengan potensi pengembangan cabang industri skala kecil relatif banyak (masing-masing tiga cabang industri).

Dari tabel 15 dan 16 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Agam, 50 Kota, Kodya Bukittinggi dan Payakumbuh merupakan empat daerah tingkat II di propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi yang relatif baik bagi pengembangan industri skala kecil, oleh karena itu aparat pemerintah daerah terutama sekali BAPPEDA masing-masing harus memberikan prioritas utama terhadap pengembangan sub sektor ini.

Berdasarkan analisa data yang disajikan pada Tabel 14, 15 dan 16 dapat diketahui keragaan sub sektor industri skala kecil sekaligus cabang-cabangnya pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat. Persoalan lain yang relatif

penting dianalisa adalah menentukan apakah industri skala kecil pada setiap daerah tingkat II merupakan satu-satunya sektor basis dibandingkan dengan sektor ekonomi lain. Untuk keperluan ini, maka ekonomi pada setiap daerah tingkat II yang industri skala kecilnya memiliki indeks LQ lebih besar dari satu (lihat Tabel 14), dibagi menjadi 4 sektor ekonomi utama yaitu industri skala kecil, industri skala menengah dan besar, pertanian dan jasa. Informasi tentang hal ini disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17: Rata-Rata Indeks LQ Industri Skala Kecil, Industri Skala Menengah dan Besar, Pertanian dan Jasa, 1988-1992.

Daerah	I	II	III	IV
A. Kabupaten				
1. Tanah Datar	1,50	0,21	1,32	0,76
2. Padang Pariaman	2,91	0,67	1,44	0,78
3. Agam	3,19	0,70	1,34	0,73
4. SO Kota	6,34	0,70	1,28	0,81
5. Pasaman	1,02	0,16	1,55	0,62
B. Kodya				
1. Padang	1,56	1,85	0,26	1,34
2. Solok	3,65	0,62	0,55	2,86
3. Sawahlunto Sjj	1,50	0,31	0,06	0,12
4. Padang Panjang	1,64	7,39	3,55	2,13
5. Bukittinggi	4,90	0,98	3,25	1,54
6. Payakumbuh	5,60	3,45	1,63	0,99

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian, 1994

Keterangan: I = Industri skala kecil

II = Industri skala menengah dan besar

III = Pertanian

IV = Jasa

Dari Tabel 17 diperoleh informasi bahwa : **Pertama** , pada setiap Kabupaten/Kodya di Sumatera barat, dimana industri

skala kecilnya merupakan sektor basis tetapi tidak merupakan satu-satunya. **Kedua**, hampir 83,33% dari jumlah kabupaten/ Kodya di Sumatera Barat industri skala kecilnya lebih unggul dibandingkan dengan industri skala menengah dan besar. **Ketiga**, ada empat daerah tingkat II yang industri skala kecilnya memiliki indeks kuosien lokasi relatif tinggi yaitu Kabupaten 50 Kota, Agam, Payakumbuh dan Bukittinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dikemukakan pada bahagian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian:

1. Industri skala kecil di Sumatera Barat menunjukkan keragaan yang selalu meningkat selama priode analisa. Baik dalam perkembangan unit usaha(1,89%), investasi(8,58%) penyerapan tenaga kerja (2,58%) maupun nilai produksi(9,99%)
2. Masing-masing cabang industri skal kecil di Sumatera Barat, memperlihatkan keragaan yang berbeda, baik dalam investasi dan produksi per tenaga kerja maupun investasi, nilai produksi dan tenaga kerja per unit usaha. Hal ini juga berlaku bagi cabang cabang industri skala kecil yang ada di setiap daerah tingkat II.
3. Industri skala kecil di Sumatera Barat tergolong sebagai sektor ekonomi basis dan menimbulkan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja wilayah.
4. Terdapat 11 daerah tingkat II di Sumatera Barat yang industri skala kecilnya berperan sebagai sektor basis dalam struktur perekonomian wilayahnya. Daerah tingkat II tersebut adalah Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Padang, Solok, Sawah Lunto Sijunjung, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh.

4. Untuk setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat, tidak seluruh daerah yang industri skala kecilnya tergolong sebagai sektor basis. Bagi daerah tingkat II yang industri skala kecilnya termasuk sektor basis, tapi tidak seluruh cabang industrinya tergolong sebagai sektor basis.
5. Daerah tingkat II yang seluruh cabang industri skala kecilnya tergolong sebagai sektor ekonomi basis adalah kabupaten Agam. Sedangkan kabupaten 50 Kota, Kodya Solok Bukittinggi dan Payakumbuh merupakan daerah tingkat II lainnya yang cabang industri skala kecilnya relatif banyak sebagai sektor basis.
6. Bagi daerah tingkat II yang industri skala kecilnya tergolong sebagai sektor basis, juga ditemukan sektor ekonomi lainnya yang berperan sebagai sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor industri skala menengah dan besar dan sektor jasa.

B. Implikasi Kebijaksanaan

Studi ini menemukan bahwa industri skala kecil di Sumatera Barat perkembangannya selalu menunjukkan peningkatan selama periode analisa. Seluruh Cabang Industri skala kecil cukup prospektif untuk dikembangkan. Temuan lain adalah sub sektor ini berperan sebagai sebagai sektor basis dalam pembangunan wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil temuan ini, dari dimensi tata ruang wilayah implikasinya adalah bahwa dalam perencanaan



silkan oleh industri skala kecil serta kebijaksanaan untuk meningkatkan mutu kualitas sumberdaya manusia yang bergerak di sub sektor ini. Kebijaksanaan konkrit untuk ini adalah memberikan pelatihan kepada para pengrajin usaha kecil dengan materi manajemen usaha skala kecil dan materi lainnya yang terkait dengan kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan lain yang perlu diupayakan adalah perbaikan infrastruktur ekonomi pedesaan seperti jaringan transportasi. Semua kebijaksanaan yang direkomendasikan ini diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri skala kecil dalam memasuki era globalisasi dan era perdagangan bebas.

Keragaan industri skala kecil pada setiap daerah tingkat II di Sumatera Barat relatif berbeda. Oleh karena itu dalam perencanaan pengembangannya harus bertitik tolak dari cabang-cabang industri kecil yang tergolong sektor basis. Implikasi penemuan ini adalah, setiap daerah tingkat II harus mengkaji secara komprehensif cabang industri skala kecil yang merupakan sektor basis di daerahnya. Dengan pengkajian tersebut dapat diperoleh informasi yang jelas dalam merumuskan kebijaksanaan pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 1990. Sumatera Barat Dalam Angka. Kerja sama BAPPEDA Tk.I Sumatera Barat dengan Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat.
- Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat. Laporan Tahunan. 1993.
- Erawan, I Nyoman, 1985. Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Daerah Bali. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas Udayana ke 23, Denpasar.
- Glasson, John, M. 1977. An Introduction to regional Planning. Hutchinson, London.
- Kamaluddin, Rustian, 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1970. Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bharata Jakarta.
- Livingstone, I. 1977 Economic Policy for Developmen. Penguin Modern Economic Reading, Middle Sex.
- Marpaung, Manuarang, 1984. Dampak Usaha Sapi Perah Dalam Pembangunan Wilayah. Tesis Megister Sains FPS-IPB, Bogor.
- Meier, Gerald, M. 1970. Leading Issues In Economic Development. Oxfort Univercity Press.
- Raharjo, Dawam, 1986. Transformasi Pertanian. Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. UI Press, Jakarta.
- Richardson, Harry W. 1977. Dasar - dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terjemahan Paul Sihotang). FE UI, Jakarta.
- Sandy, I. Made, 1982a. Pembangunan Wilayah. Mimeograf, Bogor.
- , 1982c. Pembangunan Wilayah. Publikasi No. 188, Dit. Tata Guna Tanah, Dit. Jen. Agraria, Jakarta.
- , 1983. Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional. Publikasi No. 255. Dit. Tata Guna tanah, Dit. Jen. Agraria, Jakarta.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

- Sajogjo, 1978. Lapisan Masyarakat yang paling lemah di Pedesaan Jawa. Prisma 3 April, LP3ES, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 1983. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jembatan, Jakarta.
- , Manfaat dan Risiko Lingkungan dalam Pembangunan Industri. Penataran dan diskusi Masalah Pencemaran Industri Kimia, Balai Besar Selulosa, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. FE UI, Jakarta.
- , 1978. Ekonomi Pembangunan FE UI, Jakarta.
- Tambunan, 1989. Mengapa Industri Rakyat Kecil Penting Bagi Indonesia. Suara Pembaharuan Tanggal 12 Desember 1989.
- Tiebout, CM, 1962. The Community Economic Base Study Supplementary Paper (16). Committee for Economic Development, New York.
- Timbergen, Jan. 1979. Rencana Pembangunan. Penerbit UI, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1980. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta.
- Todaro, Micael P, 1983. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (terjemahan Aminuddin). Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wong, John, 1982. Prospek Pembangunan Dasawarsa 1980-an. Bina Aksara, Jakarta.